

**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG CALON
KEPALA DAERAH BERLATAR BELAKANG POLRI
TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA
SURABAYA PADA PILKADA KOTA SURABAYA TAHUN
2020**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

AULYA VINDA YANI

NIM. I71217048

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulya Vinda Yani.

NIM : 171217048.

Program Studi : Ilmu Politik.

Judul : **Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.**

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila Skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang menyatakan



Aulya Vinda Yani

NIM: 171217048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AULYA VINDA YANI

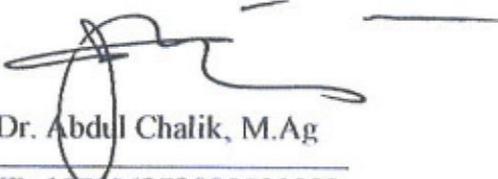
NIM : 171217048

Program Studi : ILMU POLITIK

Yang berjudul: **“Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020”**, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 20 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP: 197306272000031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Aulya Vinda Yani dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji Skripsi pada 12 April 2023.

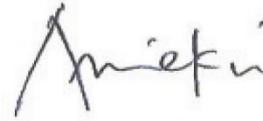
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



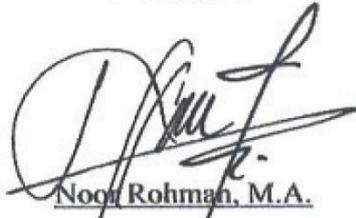
Prof. Dr. Abdul Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002

Penguji II



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP: 196909071994032001

Penguji III



Noor Rohman, M.A.
NIP: 198510192015031001

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP: 199502232020122025

Surabaya, 12 April 2023

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Abdul Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulya Vinda Yani
 NIM : 171217048
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
 E-mail address : aulyavinda.av@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2024
 Penulis

(Aulya Vinda Yani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap maraknya purnawirawan TNI & Polri yang saat ini mulai menggandrungi dunia perpolitikan Indonesia yang salah satunya terjadi di Kota Surabaya. Melihat sejarah kelam perjalanan militer Indonesia dibidang politik, tentunya menimbulkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat karena banyaknya calon kepala daerah yang dulunya seorang anggota TNI atau Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatarbelakang Polri pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020, untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020, serta menganalisis pengaruh dari persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berupa observasi, angket dan dokumentasi dan data sekunder berupa penelitian terdahulu. Adapun teori yang diujikan dalam penelitian ini adalah teori perilaku pemilih. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dan analisis statistic inferensial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan; pertama, persepsi masyarakat Surabaya tergolong pada persepsi negatif karena hasil rata-rata dari jawaban “Tidak Setuju” (67%) lebih besar dibandingkan rata-rata dari jawaban “Setuju” (33%). Kedua, masyarakat Surabaya termasuk kedalam tipe pemilih rasional, karena dalam menentukan pilihannya, masyarakat Surabaya lebih mempertimbangkan visi-misi & program kerja kandidat, kinerja & pengalaman kandidat, dan kualitas/kompetensi kandidat. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan pada persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2020 berdasarkan uji T, dimana nilai signifikansi (Sig) sebesar 0.000 (konstan), yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima.

ABSTRACT

This research was conducted based on the interested of researchers in the rise of retired TNI & Polri who are currently starting to love the world of Indonesian politics, one of which occurred in the city of Surabaya. Seeing the dark history of the Indonesian military's journey in the field of politics, of course, creates various perceptions among the public because there are many candidates for regional heads who were formerly members of TNI or Polri. The purpose of this study is to understand public receptions of regional head candidates with Polri background in the 2020 Surabaya City Election, to describe the voting behavior of thr people of Surabaya in the 2020 Surabaya City Election, and to analyze the influence of public perceptions of regional head candidates with Polri background on behavior. Elect the people of Surabaya City in the 2020 Surabaya City Election.

This study uses quantitative research methods with data collection with data collection technique using primary data in the form of observations, questionnaires and documentation and secondary data in the form of precious research. The theory of voting behavior. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis.

The result of this study tour show; First, the perception of the people of Surabaya belongs to negative perception because the average results of the answer "Disagree" (67%) is greater than the average of the answer "Agree" (33%). Second, the people of Surabaya are included in the type of rational voter, because in making their choice, the people of Surabaya consider the vision-mission & work program of the candidate, the performance & experience of the candidate, and the quality/competence of the candidate. Third there is a significant influence on public perception of regional head candidates with a background in the Polri on the voting behavior of the people of Surabaya City in the 2020 Surabaya mayoral election based on the T test where the signification value (Sig) is 0,000 (constant), which is less than 0,05 so can be concluded that H0 is rejected and H1 is accepted.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
1. Persepsi Masyarakat	11
2. Kepala Daerah Berlatarbelakang Polri	11
3. Perilaku Memilih	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kepemimpinan Publik	14
B. Persepsi	15
C. Perilaku Memilih	19
D. Dwifungsi ABRI (Perjalanan TNI-Polri)	24
E. Pemilihan Kepala Daerah	30
F. Kerangka Berpikir	31
1. Penelitian Terdahulu	31

2. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	35
C. Variabel dan Indikator Penelitian	40
D. Tempat dan Waktu Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Tahapan Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PENYAJIAN DATA	50
A. Gambaran Umum Kota Surabaya.....	50
1. Kondisi Geografis Kota Surabaya	50
2. Kondisi Demografis Kota Surabaya.....	52
B. Karakteristik Responden.....	55
C. Penyajian Data	59
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS	67
A. Persepsi Masyarakat Kota Surabaya Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.....	67
B. Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020	91
C. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020	96
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	36
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian di Tiap Kecamatan	38
Tabel 3. 3 Variabel X	41
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020	52
Tabel 4. 2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya Tahun 2020	53
Tabel 4. 3 Jumlah Pemilih Pilkada Surabaya Tahun 2020	53
Tabel 4. 4 Jumlah Pemeluk Agama di Surabaya Tahun 2020	54
Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah di Kota Surabaya	55
Tabel 4. 6 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4. 7 Jumlah Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4. 8 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 4. 9 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan	56
Tabel 4. 10 Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan	57
Tabel 4. 11 Jumlah Responden Berdasarkan Agama	58
Tabel 4. 12 Calon Walikota Surabaya	59
Tabel 4. 13 Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri	59
Tabel 4. 14 Visi Misi dan Program Kerja Machfud Arifin	60
Tabel 4. 15 Persepsi Responden Terhadap Machfud Arifin	60
Tabel 4. 16 Machfud Arifin Sebagai Walikota Surabaya	61
Tabel 4. 17 Latar belakang Calon Kepala Daerah	61
Tabel 4. 18 Latar belakang Calon Kepala Daerah	61
Tabel 4. 19 Latar belakang Calon Kepala Daerah	62
Tabel 4. 20 Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Surabaya 2020	62
Tabel 4. 21 Presentase Pilihan Pada Pemilihan Walikota Surabaya 2020	62

Tabel 4. 22 Alasan Responden Memilih Calon Walikota	63
Tabel 4. 23 Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Responden	65
Tabel 4. 24 Perilaku Memilih Masyarakat	66
Tabel 5. 1 Persepsi Masyarakat Terhadap Machfud Arifin	67
Tabel 5. 2 Persepsi Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 5. 3 Persepsi Masyarakat Berdasarkan Usia	71
Tabel 5. 4 Persepsi Berdasarkan Pendidikan Terakhir	77
Tabel 5. 5 Persepsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan	83
Tabel 5. 6 Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya	91
Tabel 5. 7 Perilaku Memilih Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Tabel 5. 8 Perilaku Memilih Berdasarkan Usia	93
Tabel 5. 9 Perilaku Memilih Berdasarkan Pendidikan Terakhir	94
Tabel 5. 10 Perilaku Memilih Berdasarkan Pekerjaan	95
Tabel 5. 11 Besaran Pengaruh Antar Variabel	97
Tabel 5. 12 Kriteria Tingkat Korelasi	98
Tabel 5. 13 Uji T (Sig 0.05)	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keterlibatan militer dalam ranah politik selalu menjadi isu krusial termasuk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer telah memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa. Sehingga bertahun-tahun setelah kemerdekaan, dengan mudah melihat betapa mencoloknya peranan militer dalam kehidupan politik. Begitu jelas dan pentingnya peranan politik tentara saat itu sangat masuk akal jika dikatakan bahwa karakteristik yang paling menonjol saat itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik. Praktik dualisme ini meninggalkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena terlalu lamanya militer terlibat dalam politik dan dianggap telah mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis.

Awal munculnya peran sosial politik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan resmi mengenai keterlibatan militer dalam politik terjadi ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957, setelah peranan partai-partai politik (kecuali PKI) dilumpuhkan dan Undang-Undang Darurat diberlakukan. Dewan Nasional adalah suatu lembaga yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, yang tidak tersalurkan kedalam lembaga-lembaga yang ada. Tugas dewan nasional adalah untuk memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada pemerintah serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.¹ Adanya Dewan Nasional, bertujuan untuk membantu kabinet dalam menjalankan program-programnya. Namun dalam praktiknya pembentukan Dewan Nasional justru melenceng dan mengambil alih peran

¹ Departemen Tenaga Kerja, *Sejarah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1992), hlm 65.

partai politik.² Peraturan perundangan menyinggung kedudukan Tentara sebagai golongan fungsional, diantaranya UU No. 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional, UU No. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS.1960.³

Di era Orde Lama, tentara memiliki keyakinan tentang peranannya yang penting selama revolusi baik sebagai pendiri dan sebagai pemerintah yang efektif di beberapa wilayah, sehingga memberikannya hak untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi ini selalu menimbulkan problem ketika dilaksanakan di dalam sistem parlementer, dan pendefinisian militer sebagai golongan fungsional pada tahun 1957 merupakan suatu usaha untuk melegitimasi partisipasi mereka dalam pemerintahan. Selain itu, Kastaf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Nasution telah merumuskan “Jalan Tengah” untuk menjustifikasi peranan militer, yang artinya AD tidak akan berusaha mengambil alih pemerintahan dan secara politik tidak akan aktif. Meskipun demikian militer tetap menuntut hak perwakilan tetap di kabinet, legislative dan pemerintahan.⁴

Peran militer Indonesia dalam bidang militer dan non-militer meningkat pesat saat sebelum hingga sesudah tahun 1957, yang puncaknya setelah terjadinya kudeta pada tahun 1965. Akibat dari kudeta tersebut, kekuatan-kekuatan anti-Soekarno dan anti-PKI semakin menguat. Berbagai Front Aksi seperti mahasiswa dan cendekiawan melancarkan demokrasi untuk menentang rezim Soekarno. Hingga pada 11 Maret 1966 Soekarno didesak oleh tantara untuk mengalihkan kekuasaannya kepada Soeharto. Oleh karena itu, militer diberikan kendali atas pemerintahan sementara. Tentara menjalankan kekuasaan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengatur suatu negara. Saat itu ada doktrin dualisme yang menganggap angkatan darat memiliki peran ganda,

² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), Cetakan kedua, hlm 10.

³ Febrinita Dwi Istyaningrum, Skripsi: “*Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*”, (Semarang: UNNES, 2004), hlm 55, diakses pada lib.unnes.ac.id.

⁴ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), Cetakan kedua, hlm 11.

militer dan non-militer, tetapi tidak ada pernyataan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan setelah berkuasa dan siapa yang memerintah. Negara ini tidak diatur oleh pemerintah militer atau oleh partai politik yang mewakili kepentingan militer.⁵

Pada bulan Agustus 1966, tentara menyelenggarakan seminar di Bandung untuk memutuskan tentang peranan militer di bidang sosio-ekonomi dan politik di Indonesia pasca 1965. Seminar tersebut didominasi oleh pejabat-pejabat tentara yang militan dan para cendekiawan PSI, yang telah mengusulkan perubahan sosio-politik termasuk rencana untuk menstrukturisasi sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam seminar tersebut memutuskan bahwa dwifungsi ABRI harus menjadi ciri kehidupan politik Indonesia, sehingga peranan tentara sejak saat itu tidak boleh diremehkan.⁶

Perjalanan awal Orde Baru, ABRI yang merupakan gabungan dari TNI dan Polri mendominasi di segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Peraturan yang menyangkut Dwifungsi ABRI pada awal Orde Baru terdapat pada Ketetapan MPRS no. XXIV/MPRS/1966 disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang isinya “Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan Sentosa”. Kemudian terdapat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang isinya “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara”.⁷ Dilanjutkan dengan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang

⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), Cetakan kedua, hlm 25.

⁶ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), Cetakan kedua, hlm 26.

⁷ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), Cetakan kedua, hlm 55.

menegaskan bahwa pengaturan peran sosial politik ABRI adalah sebagai kekuatan sosial yang bertindak selaku dinamisor dan stabilisor.⁸ Dan yang terakhir UU No. 2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI yang ditegaskan pada pasal 6, yaitu “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan social politik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dwifungsi ABRI memiliki dasar hukum yang sangat kuat saat itu.

Dwifungsi ABRI, yang merupakan alat utama Orde Baru mengakibatkan pertumbuhan *civil society* terhalang. *Civil society* merupakan suatu bentuk kehidupan social yang terorganisasi, bersifat sukarela, mandiri, otonom terhadap negara, mampu mengisi ruang public yang bebas, terikat oleh peraturan hukum, pembela rakyat, pluralis, dan menghargai perbedaan.⁹ Orde Baru juga menciptakan peraturan-peraturan yang pada dasarnya menghalangi partisipasi politik rakyat dan menjauhkan masyarakat dari keterlibatan langsung dalam dunia politik, yang diantaranya paket lima undang-undang politik yang membatasi partai dan organisasi massa, melarang pelajar, organisasi buruh, organisasi tani, dan sebagainya dalam kegiatan politik.¹⁰ Paket lima undang-undang yang dimaksud adalah UU No.1 Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum; UU No.1 Tahun 1985 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR; UU No.1 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya; UU No.1 Tahun 1985 Tentang Referendum; dan UU No.1 Tahun 1985 Tentang Organisasi Massa.

Akibat dari praktik depolitisasi tersebut, membuat masyarakat semakin apatis dan tidak bersemangat serta tanggung jawab social masyarakat melemah. Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru yang menyandangkan

⁸ Wendri, Jurnal Komunikasi: “Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan tentang Calon Gubernur Berlatarbelakang TNI Pada Pilkada 2018”, Vol.1 No.2 hlm 60-61. Diakses pada journal.umsu.ac.id.

⁹ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), cetakan pertama hlm 171.

¹⁰ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), cetakan pertama, hlm 176.

dwifungsi ABRI telah membunuh benih-benih yang berusaha berkembang. Tidak hanya itu, demokrasi juga tidak berjalan dengan lancar. Sebab, pemerintahan Orde Baru dengan dwifungsi militernya telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah yang mengedepankan kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan berorganisasi dan bebas dalam berpartisipasi politik.

Kebebasan tidak bisa diciptakan, karena Orde Baru tidak memperbolehkan organisasi atau kelompok yang ingin bebas dari negara, bahkan ruang public juga dilarang karena dikhawatirkan merupakan arena berkumpul dan berkomunikasi untuk berpartisipasi dalam politik. Akses terhadap lembaga negara sulit diwujudkan, karena Orde Baru menghalangi partisipasi politik rakyat. Rakyat hanya boleh menerima kebijakan dari atas, unjuk rasa dilarang, egalitarianism dan pengakuan terhadap pluralisme juga tidak dapat berkembang. Orde Baru bersifat eksklusif dan berusaha mewujudkan keseragaman dalam segala hal.¹¹ Halangan-halangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui undang-undang dan peraturan yang diciptakan maupun dengan tindakan secara langsung. Kombinasi persuasive, represif, dan koersif akan dilakukan militer untuk menghentikan berbagai halangan. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi milik Dahl, yaitu kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi; kebebasan mengeluarkan pendapat; hak bersuara; kesempatan memperoleh jabatan publik; hak pimpinan politik untuk bersaing untuk mendapatkan dukungan melalui pemilihan umum; hak memperoleh informasi alternative; adanya pemilihan umum yang bebas dan jujur; lembaga yang membuat kebijakan politik tergantung pada pemungutan suara; dan ekspresi penentuan pemilihan.¹² Selain itu Arend Lijphart menyatakan bahwa beberapa hal yang merupakan karakteristik demokrasi diantaranya adanya pembagian

¹¹ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), cetakan pertama hlm 176-177.

¹² Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), cetakan pertama hlm 178.

kekuasaan baik secara formal maupun informal, sistem multipartai, veto yang kecil. Pada pemerintahan Soeharto tidak ada pembagian kekuasaan baik dari internal eksekutif atau dari legislative dan yudikatif. Soeharto berperan sentral dan paling berkuasa selama masa pemerintahannya. Baik militer, golongan karya, ormas-ormas tidak lepas dari pengaruh Soeharto.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa politik Orde Baru dengan Dwifungsi Militernya memiliki peran yang negative dalam kehidupan sosial Indonesia.

Era Pemerintahan Orde Baru memiliki banyak kebijakan yang membuat sistem negara Indonesia beralih dari sistem demokrasi menjadi otoriter. Penggantian Presiden Soekarno ke Soeharto merupakan upaya mewujudkan negara yang demokratis. Dalam hal demokrasi politik, Soeharto menerapkan adanya Penelitian Khusus (Litsus) bagi calon anggota legislative yang berdasar pada Keppres No.16 Tahun 1990 dengan tujuan baik untuk membersihkan dan menertibkan tubuh aparatur negara dari bahaya komunis dan kekuatan ekstrim lainnya. Namun kenyataannya Litsus tidak lebih dari sekadar campur tangan kekuasaan untuk menentukan siapa calon-calon legislative terpilih.¹⁴ Hal lain yang termasuk perbuatan rekayasa adalah pengangkatan DPR yang seharusnya melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 mengatur bahwa: Pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan cara Pemilihan Umum dan pengangkatan. Jumlah anggota DPR adalah 460 orang, sedangkan partai-partai dibatasi dan tidak dibiarkan tumbuh berkembang. Pembatasan ini terlihat dari hanya diperbolehkannya dua partai dengan satu Golongan Karya. Ketiganya inilah yang hanya boleh mengikuti pemilihan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D tentang kebebasan berekspresi. Seharusnya negara menjamin kebebasan berekspresi yang artinya partai politik pun tidak boleh dibatasi. Selain itu pers,

¹³ Ryan Muthiara Wasti, Jurnal: “*Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia*”, Tahun ke-45 No.1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm 91.

¹⁴ Ryan Muthiara Wasti, Jurnal: “*Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia*”, Tahun ke-45 No.1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm 87.

sebagai media menyampaikan pendapat juga dibatasi sebagaimana bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.¹⁵

Pemerintahan Orde Baru sering mendapat sorotan dari dunia internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh kasus yang ramai dibicarakan hingga keluar negeri adalah ABRI yang menembaki puluhan warga sipil Timor Timur di Pemakaman Santa Cruz yang menewaskan 19 orang dan melukai 50 lainnya. Akibat dari kasus tersebut Soeharto mendapatkan peringatan langsung dari negara-negara barat mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Kasus lain yang banyak dibicarakan diluar negeri adalah kasus Marsinah pada Mei 1993, dimana seorang aktivis buruh diculik dan diperkosa secara brutal dan kemudian disiksa hingga mati.¹⁶

Tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok, harga premium naik dua kali lipat, ribuan usaha bangkrut hingga naiknya angka pengangguran dan terjadinya PHK secara besar-besaran. Akibat dari krisis ekonomi ini ketimpangan social semakin terlihat sehingga menimbulkan kecemburuan social karena fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pengusaha rakyat biasa tidak samayang diberikan kepada kroni dan keluarganya. Secara tidak langsung pemerintah telah memicu kemarahan masyarakat terutama mahasiswa yang prihatin atas ketidakadilan, sehingga mahasiswa melakukan protes besar-besaran terhadap pemerintahan Orde Baru. Protes dilakukan dengan cara demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di seluruh Indonesia dengan maksud mendesak Soeharto agar segera turun dari jabatannya sebagai presiden, dan segera melakukan reformasi.¹⁷ Agenda reformasi yang menjadi tuntutan mahasiswa saat itu diantaranya adalah mengadili Soeharto beserta kroninya, mengamandemen UUD 1945, menghapuskan Dwi Fungsi ABRI,

¹⁵ Ryan Muthiara Wasti, Jurnal: “*Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia*”, Tahun ke-45 No.1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm 89-90.

¹⁶ Lilik Eka Aprilia, Kayan Swastika, dll, *Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm 5.

¹⁷ Lilik Eka Aprilia, Kayan Swastika, dll, *Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm 5.

Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan hukum, dan menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Hingga akhirnya usaha demonstrasi yang dilakukan mahasiswa saat itu membuahkan hasil dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.

Setelah gerakan reformasi 1998, reformasi militer dilaksanakan di bawah tekanan publik. Meskipun prosesnya bertahap, reformasi tetap menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Reformasi militer di bidang politik berjalan melalui tiga langkah. Langkah pertama adalah penarikan dukungan militer untuk partai politik, terutama Golkar. Langkah kedua adalah penarikan total perwakilan fraksi TNI dan reformasi polisi di parlemen hingga tahun 2004. Langkah ketiga adalah pelembagaan reformasi dalam institusi militer melalui perubahan mendasar pada doktrin militer untuk mendapatkan posisi netral dari proses politik dan berubah menjadi tantara professional. Keterlibatan militer dalam politik secara resmi telah berakhir sejak diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang perumusannya juga melibatkan militer. Di dalam UU pasal 39 disebutkan larangan-larangan yang diperuntukkan prajurit aktif militer, diantaranya larangan terlibat dalam kegiatan partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota pemilihan legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya,¹⁸ dan hanya seorang purnawirawan yang bisa mengikuti kegiatan politik lagi.

Melihat sejarah kelam perjalanan militer Indonesia di bidang politik, tentunya menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat karena banyaknya calon pemimpin yang dulunya seorang anggota TNI atau Polri. Beberapa orang yang pernah peneliti temui berpendapat bahwa seseorang yang memiliki latar belakang militer dianggap sebagai solusi menjadi pemimpin, karena mereka memiliki tingkat kedisiplinan dan nasionalisme yang tinggi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa seseorang dari kalangan militer

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

memiliki ambisi yang besar bahkan tidak dapat dipercaya sehingga bisa melakukan apa saja demi tujuannya. Sehingga muncul rasa ketertarikan dari penulis untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, karena Surabaya baru saja melaksanakan Pemilihan Walikota pada Tanggal 9 Desember 2020 lalu yang diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 adalah Eri Cahyadi – Armuji dan pasangan nomor urut 2 adalah Machfud Arifin – Mujiaman. Salah satu calon yang menjadi objek penelitian ini memiliki latar belakang Polri yaitu Irjen. Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H. seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat. Penelitian ini dikemas dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020”.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan penelitian diperlukan agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
2. Perilaku memilih masyarakat kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
3. Pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020?
2. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang pengaruh persepsi masyarakat mengenai calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu politik. selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan teori-teori yang nantinya dapat mengembangkan kemampuan pemahaman penulis maupun pembaca, serta sebagai pengembangan keilmuan di bidang ilmu politik.

F. Definisi Operasional

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Atau juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan atau pendapat dari kumpulan individu yang saling berinteraksi mengenai peristiwa atau persoalan yang menarik perhatiannya, sehingga reaksi tersebut menjadi sebuah opini yang dinamakan persepsi masyarakat.

2. Kepala Daerah Berlatarbelakang Polri

Dalam penelitian ini latar belakang yang dimiliki oleh calon Kepala Daerah Kota Surabaya adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, purnawirawan Polri adalah Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.¹⁹ Sehingga yang dimaksudkan kepala daerah berlatar belakang Polri dalam penelitian ini adalah kepala daerah yang dulunya pernah menjabat sebagai anggota militer atau kepolisian yang telah menyelesaikan dinasnya atau biasa

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses pada portal.divkum.polri.go.id

disebut sebagai purnawirawan Polri. Dengan selesainya masa dinas, memungkinkan para purnawirawan dengan bebas dalam menentukan orientasi politiknya.

3. Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah kegiatan seseorang dalam memberikan suaranya dalam sebuah pemilihan berdasarkan keyakinan dirinya sendiri maupun pengaruh pihak lain. Ada empat tipe pemilih diantaranya:

- a. Pemilih Rasional. Pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai atau calon dalam memberikan program kerja atau kebijakan, selain itu pemilih jenis ini juga mengutamakan kualitas kinerja atau pengalaman yang dimiliki oleh partai atau calon di masa lalu.
- b. Pemilih Tradisional. Pemilih jenis ini mengutamakan kedekatan aspek sosial-budaya, asal-usul, keluarga, lingkungan dan agama.
- c. Pemilih Kritis. Pemilih jenis ini akan mendalami kaitan antara ideologi dan kebijakan yang dimiliki partai atau calon.
- d. Pemilih Skeptis. Pemilih jenis ini cenderung memilih secara acak tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjadi dasar topik permasalahan yang akan dicari dalam penelitian, diantaranya latar belakang; batasan penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan definisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan secara rinci teori-teori yang relevan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi, diantaranya; Kepemimpinan Publik; Persepsi Masyarakat; dan Perilaku Memilih.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya; pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampel dan teknik sampling; variabel dan indikator penelitian; tempat dan waktu penelitian; teknik pengumpulan data; tahapan penelitian; dan teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab ini memaparkan obyek dan hasil penelitian, diantaranya deskripsi umum obyek penelitian, karakteristik responden dan penyajian data.

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini memaparkan dan menganalisis apa yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu; Persepsi Masyarakat Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020; Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020; Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Publik

Teori mengenai kepemimpinan dari Robbins dan Judge dalam buku milik Dudih Sutrisman²⁰, menyebutkan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Teori tersebut memberikan penekanan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Rivai dan Mulyadi kepemimpinan merupakan proses dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebelum tujuan ditetapkan, telah dilakukan upaya mempengaruhi dalam menentukan suatu tujuan organisasi. Setelah tujuan ditetapkan, barulah terdapat upaya memotivasi terhadap perilaku anggota untuk mencapai tujuan tersebut.

Fenomena yang sedang marak saat ini adalah ikut sertanya calon pemimpin yang berasal dari sipil maupun militer. Adanya calon pemimpin dengan kekuatan militer yang masih dapat dikatakan kuat, terjadi karena masih terdapat *post power syndrome*, yaitu adanya keyakinan bahwa calon pemimpin dari militer masih memiliki kapabilitas sebagai pemimpin bangsa.

Ketika menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dengan beberapa tipe, tipe kepemimpinan menurut Rivai dan Mulyadi terdiri dari tiga, yaitu:

²⁰ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm 86.

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter. Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan berada di tangan satu orang, atau bisa disebut penguasa tunggal.
2. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas. Tipe kepemimpinan ini dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam melakukan keputusan maupun kegiatan sesuai keinginan masing-masing kelompok maupun individu.
3. Tipe Kepemimpinan Demokratis. Tipe kepemimpinan ini mengutamakan musyawarah dalam menentukan setiap keputusan.²¹

Sedangkan Siagian menambahkan bahwasannya terdapat tiga tipe kepemimpinan lainnya, yaitu:

1. Tipe Paternalistik. Tipe kepemimpinan ini mengutamakan kebersamaan.
2. Tipe Karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang dikagumi dan memiliki pengikut yang cukup banyak meskipun tidak terlalu jelas mengapa orang tersebut dikagumi.
3. Tipe *laissez faire*. Tipe kepemimpinan ini cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan tanpa banyak ikut campur.²²

B. Persepsi

Menurut Robbins dalam buku Dudih Sutrisman, persepsi adalah proses dimana orang mengatur dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Teori ini menyatakan bahwa persepsi adalah suatu usaha untuk melihat pendapat atau pandangan seseorang terhadap apa yang terjadi di sekitarnya berdasarkan apa yang dapat dirasakannya²³

²¹ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm 104.

²² Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm 105.

²³ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm 75

1. Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Ivanna Frestilya Ari Shandi, setelah seseorang berinteraksi dengan objek-objek yang menarik perhatiannya dan mengungkapkan persepsinya, maka hasil persepsi dibagi menjadi dua model, yakni:

- a. Persepsi positif, adalah persepsi yang menggambarkan pengetahuan (tahu tidaknya, kenal tidaknya) dan tanggapan diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini diteruskan dengan tindakan atau menerima dan mendukung onjek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif, adalah persepsi yang menggambarkan pengetahuan (tahu tidaknya, kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan penolakan bahkan tentangan terhadap objek yang dipersepsikan.²⁴

2. Ciri-Ciri Persepsi

- a. Persepsi adalah cara pandang seseorang dalam menanggapi suatu peristiwa.
- b. Adanya dorongan berupa stimulus (input) mengorganisasikan stimulus dan menafsirkan stimulus.
- c. Adanya pengalaman tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan informasi atau pesan.
- d. Adanya proses pemberian makna terhadap lingkungan sekitar seorang individu.²⁵

²⁴ Ivanna Frestilya Ari Shandi, Skripsi: “*Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”, (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm 14. Diakses pada repository.metrouniv.ac.id.

²⁵ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019) hlm 78.

3. Proses Terbentuknya Persepsi

Pada pemaparan diatas dikatakan bahwa dalam membuat persepsi seorang individu akan mengorganisasikan dan meninterpretasikan stimulus. Dengan demikian stimulus menjadi salah satu factor yang diperhitungkan dalam upaya membentuk suatu persepsi. Sebuah persepsi akan muncul ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi tertentu. Menurut Thoha dalam buku Dudih Sutrisman setelah stimulus proses selanjutnya adalah:

- a. Registrasi. Sebagai suatu upaya seleksi terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera manusia, dalam tahap ini alat indera diberi rangsangan.
- b. Interpretasi. Pada tahap ini rangsangan terhadap indera tersebut diatur menurut sebagai prinsip sehingga menghasilkan suatu interpretasi atau pandangan terhadap suatu hal yang terjadi.
- c. Umpan balik (feedback). Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang berupa tingkah laku sebagai reaksi terhadap suatu hal yang terjadi.²⁶

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi setiap orang terhadap suatu fenomena sangat beragam, hal itu dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Miftah Toha menyatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- a. Factor internal: perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (focus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Factor eksternal: latar belakang, keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas,

²⁶ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019) hlm 80.

ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Factor-faktor lainnya:

- a. Frame of reference, merupakan kerangka pengetahuan yang dimiliki yang dipengaruhi oleh pendidikan, bacaan, penelitian, dll.
- b. Frame of experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.²⁷

Sedangkan menurut Robbins, factor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- a. Individu yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat suatu fenomena dan ia berusaha memberikan pendapat tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan dan harapannya.
- b. Sasaran/objek. Objek biasanya berupa orang, benda, atau peristiwa. biasanya, sifat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang ketika melihatnya. Persepsi terhadap objek bukan sesuatu yang dapat dilihat secara teori, tetapi dengan orang yang terlibat. Hal ini mengakibatkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok yang berbeda.
- c. Situasi. Situasi turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Karena ketika fenomena/masalah timbul, situasi akan mempengaruhi bagaimana persepsi terbentuk.²⁸

²⁷ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: Ikapi, 2020), cetakan 1, hlm 52-53.

²⁸ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: Ikapi, 2020), cetakan 1, hlm 53.

Pada hakekatnya persepsi merupakan hubungan dari berbagai komponen. Terdapat tiga komponen yang membentuk struktur persepsi, yaitu:

a. Komponen Kognitif (komponen perseptual)

Komponen kognatif merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal yang berkaitan langsung dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek, sikap, kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya politik dan atributnya seperti visi dan misi, tokoh pemerintahan, kepala pemerintahan, dan lain sebagainya.

b. Komponen Afektif (komponen emosional)

Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek atau sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negative.

c. Komponen Konatif (komponen personal)

Komponen konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.²⁹

C. Perilaku Memilih

Menurut Firmanzah, perilaku pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama pada kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakin agar mendukung dan memberikan suara kepada kontestan yang

²⁹ Andi Pasinringi & Syamsul Bahri, Jurnal: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Platform Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Efektifitas Kominikasi Politik Pada Aspek Kognitif, Afektif dan Konatif Di Kecamatan Mamboro Barat)*”, Vol.6 No.2, (Palu: Universitas Tadulako, 2019), hlm273-274.

bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian perilaku dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan sebagainya.³⁰ Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan politik, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. Menurut beberapa ahli, perilaku memilih didefinisikan sebagai berikut:

1. Jack C.Plano. Perilaku memilih adalah suatu studi yang memusatkan diri pada kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.
2. Budiarto. Perilaku memilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
3. Susanto. Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.

Menurut Firmanzah pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Beliau membagi dua hal yang bisa dijadikan ukuran mengenai cara pemilih dalam menilai kedekatannya dengan partai politik atau seorang kontestan. Kedua orientasi tersebut diantaranya:

1. Orientasi *policy-problem-solving*

Ketika pemilih menilai sebuah partai politik atau kontestan politik menggunakan orientasi *policy-problem-solving*, yang diutamakan oleh mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan. Pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap cara

³⁰ Asmadi & Herri Julius Nge, *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Kasus Kabupaten Sambas)*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm 11.

kontestan (partai politik atau calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin efektif seorang kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih oleh para pemilih.³¹

2. Orientasi *ideology*.

Ideologi dianggap sebagai identitas yang menyatukan satu kelompok atau golongan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok atau golongan lain. Ideologi meliputi semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur social masyarakat. Pemilih yang mengutamakan ikatan ideologi suatu partai politik atau kontestan politik akan cenderung menekankan subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, norma, moralitas, dan emosi. Semakin dekat kesamaan dengan partai politik atau kontestan, pemilih juga akan cenderung memberikan suaranya kepada partai atau kontestan tersebut.³²

Menurut Firmanzah terdapat empat tipe pemilih yang ditemukan dalam menentukan pilihannya pada suatu pemilihan umum, yaitu:

1. Pemilih Rasional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi tinggi pada *policy-problem-solving* dan tidak begitu mementingkan ikatan ideologi terhadap suatu partai politik atau seorang kontestan. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau platform dapat dianalisis dalam dua hal, yaitu kinerja partai di masa lalu dan tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

³¹ Firmazah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 101

³² Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 105-106

Faktor seperti paham, asal-usul, nilai-nilai, budaya dan agama memang masih dipertimbangkan, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan.³³

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak mudah membuat pemilih rasional berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua hal, yaitu:

- a. Nilai ideologis menjadi pijakan pertama untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan.
- b. Sebaliknya, dimana pemilih lebih tertatik dahulu kepada program kerja yang ditawarkan oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, yaitu mereka akan selalu mendalami dan menganalisis kaitan antara nilai ideologi dan kebijakan yang dibuat.³⁴

3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan

³³ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 120

³⁴ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 121.

sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat Pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai dan paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling menonjol dalam jenis pemilih ini. di Indonesia sendiri pemilih jenis ini merupakan mayoritas. Secara umum, masyarakat masih berpegang pada ideologi. Dahulu, masyarakat sangat mudah di mobilisasi oleh para pemimpin. Namun saat ini mobilisasi politik di Indonesia diwarnai dengan uang atau imbalan dalam bentuk barang.³⁵

4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Golongan putih sangat mendominasi pemilih jenis ini. Kalaupun ikut berpartisipasi pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti pada kepemimpinannya nanti.³⁶

³⁵ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 123-124.

³⁶ Firmanzah *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 124-125.

D. Dwifungsi ABRI (Perjalanan TNI-Polri)

Dwifungsi ABRI merupakan gagasan yang diterapkan Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa militer (TNI dan Polri) memiliki dua tugas sekaligus, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban negara sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara (dibidang politik). Konsep Dwifungsi ABRI ditetapkan secara resmi sejak Pemerintahan Orde Baru dengan diciptakannya Ketetapan MPRS No.XXIV/MPRS/1966. Ketetapan tersebut memuat:

Dalam penyelenggaraan Dwifungsi ABRI, khususnya kekaryaan dan operasi bakti, supaya betul-betul dilandaskan dasar manfaat, dan memperhitungkan suasana dan keadaan yang dinilai kembali oleh MPR setiap lima tahun sekali. Fungsi kekaryaan ABRI yang diselenggarakan atas landasan kemanfaatan, mengingat keadaan dan suasana, akan dinilai oleh MPR(S) dalam rangka politik penyediaan dan suasana, akan dinilai oleh bakti adalah pemanfaatan kemampuan dan keahlian teknis ABRI dalam rangka pembangunan negara dengan tidak mengabaikan kewaspadaan dan kesiap-siagaan keamanan nasional.³⁷

Disamping ketetapan MPR(S), terdapat pula landasan Dwifungsi berupa Undang-Undang. Yang pertama dibentuk adalah UU No.15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum dan UU No.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di dalam UU No. 16 tersebut terdapat ketentuan adanya perwakilan golongan karya dan ABRI dalam MPR, DPR, dan DPRD, baik tingkat I maupun tingkat II, selain itu juga dicantumkan fungsi ABRI sebagai alat negara dan sebagai kekuatan social. Kedua UU inilah awal mula demokrasi di Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru mulai terhalang. Disamping landasan hukum, dwifungsi juga memiliki landasan doktrin yang dinamakan Cadek (Catur Dharma Eka Karma). Cadek merupakan

³⁷ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 147.

doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial politik, dan karenanya sejak tahun 1970 dikeluarkanlah pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan fungsi social politik ABRI.³⁸

Pada awalnya konsepsi Dwifungsi ABRI bisa dimengerti bahkan diterima hingga tingkat tertentu. Namun, karena mengalami kesalahan penafsiran yang menyebabkan penyimpangan dalam praktik dan pelaksanaannya, berakhir dengan timbulnya banyak kritikan dari berbagai kalangan. Sebab, ABRI telah telah menguasai banyak aspek kehidupan dengan praktik-praktik yang tidak wajar. ABRI dijadikan alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto yang mengakibatkan masyarakat hilang simpati kepada ABRI. Beberapa format politik Orde Baru yang menonjol, diantaranya:

1. Politik sentralisasi di tangan eksekutif.
2. Pendekatan keamanan menjadi ciri yang menonjol
3. Dominasi militer dengan pendayagunaan dan perluasan Dwifungsi ABRI.
4. Rendahnya apresiasi terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia.
5. Otoritas birokrasi yang berlebihan.³⁹

Luasnya peran ABRI dibidang social politik mengakibatkan kehidupan demokrasi tidak berkembang dan ABRI dianggap tidak bisa bersikap profesional lagi hingga pada 21 Mei 1998 Orde Baru runtuh akibat tuntutan reformasi dari kalangan masyarakat luas. Masyarakat menilai pemeritahan Orde Baru sangat otokratis dan militeristik yang mengekang demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Kondisi itu diperparah dengan situasi negara yang sedang mengalami krisis keuangan yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya.

³⁸ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 148-151.

³⁹ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 153.

Untuk menyikapi kondisi itu, perwakilan ABRI di MPR mengusulkan dua hal penting pada sidang MPR Maret 1998. Dua hal tersebut adalah, pertama, segera mengatasi krisis keuangan dan gejolak ekonomi. Kedua, segera melakukan reformasi menyeluruh terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang bersifat fundamental, structural dan kultural.⁴⁰

Saat awal reformasi diwarnai dengan ketegangan, ABRI yang sedang berusaha menjaga proses pergantian presiden justru harus menerima kecaman dan cacian oleh masyarakat luas terutama mahasiswa karena perannya sebagai alat kekuasaan yang otokratis pada masa Orde Baru. Meskipun ABRI berpeluang untuk mengambil alih kendali pemerintahan ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, ABRI tidak bertindak demikian dan menyatakan bahwa mereka bertekad untuk mengamankan jalannya reformasi yang konstitusional untuk menciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Dan terhadap kecaman, hujatan dan cacian masyarakat, ABRI tetap tegar dan terus melanjutkan upaya mengatasi krisis khususnya mencegah disintegrasi bangsa dan mengawal reformasi nasional.

Segera setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, Presiden Habibie diangkat sebagai presiden sementara. Menurut penilaian berdasarkan laporan yang dirilis ICG (International Crisis Group), Presiden Habibie setidaknya melakukan tiga langkah reformasi militer, yaitu:

1. Pengurangan besar-besaran perwakilan militer di parlemen.
Pada tahun 1998 terdapat 75 perwira militer di DPR, 2.800 di parlemen provinsi dan 306 di DPRD dan pemerintahan kabupaten/kota. Pada tahun 1999 pengurangan dilakukan hingga 38

⁴⁰ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 198-199.

orang di DPR (berdasarkan UU No.4/1999) dan jumlahnya dari 20% menjadi 10% di parlemen local. Jumlah kursi MPR juga berkurang dari 1.000 menjadi 700 kursi termasuk 500 anggota DPR, 135 kelompok fungsional dan 65 di perwakilan daerah.

2. Pemindehan perwira militer aktif dari posisi birokrasi pemerintahan sipil

Pada tanggal 1 April 1999, para perwira diwajibkan untuk mengaktifkan kembali dinas militer mereka dan memberi mereka pilihan untuk mengundurkan diri sebagai perwira atau tetap di posisi sipil. Peraturan yang sama juga memuat pemisahan polisi dari militer, meskipun keduanya masih di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

3. Mengonfirmasi netralitas militer dari kepentingan politik

Jatuhnya Soeharto memberikan momentum bagi para pemimpin militer untuk menegaskan pemutusan hubungan antara militer dan Golkar. Dalam pemilihan 1999, Jenderal Wiranto sebagai Panglima Angkatan Bersenjata memerintahkan militer untuk tidak terlibat dalam kampanye atau dalam mobilisasi pemilu.⁴¹

Upaya reformasi militer selanjutnya dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang berfokus pada melemahkan pengaruh militer melalui perombakan sirkulasi elite di dalam hirarki kepemimpinan militer. Presiden Wahid mengganti Jenderal Wiranto dan menunjuk Laksamana Widodo A. S. dari Angkatan laut dan mengganti beberapa yang lainnya. Selain itu, upaya reformasi militer juga dilakukan oleh Presiden Megawati. Militer dikondisikan agar menyadari bahwa mereka tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan dominan dalam pembuatan kebijakan.

⁴¹ M. Faishal Aminuddin, *Politik Mantan Serdadu (Purnawirawan dalam Politik Indonesia 1998-2014)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019) cetakan pertama, hlm 54-55.

Pemilihan presiden pada tahun 2004 dianggap sebagai awal reformasi penting Lembaga-lembaga politik di Indonesia sekaligus mengakhiri transisi demokrasi yang dimulai pada tahun 1998. Sebagaimana diketahui, keterlibatan militer dalam politik pada periode awal transisi demokrasi sangat besar. Jumlah anggota militer yang menjadi anggota legislative di tingkat nasional dan local pada tahun 1999-2004 sekitar 1.461 orang. Pasca keluarnya UU TNI Tahun 2004, sebanyak 1.244 anggota militer aktif ditarik keluar dari jabatan mereka, dari parlemen nasional ke parlemen local, dan diberi pilihan untuk kembali ke posisi militer atau mengundurkan diri dari dinas aktif militer. Hanya sekitar 196 yang sudah menjadi purnawirawan yang dapat melanjutkan tugas sebagai legislator.⁴²

Keterlibatan militer dalam politik berakshir secara resmi sejak disahkannya UU NO. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang perumusannya juga melibatkan orang-orang militer. Di dalam pasal 39, Undang-Undang melarang anggota militer untuk terlibat dalam kegiatan partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan pemilu, dan urusan politik lainnya. Sebagai langkah selanjutnya, Panglima TNI menanggapi dengan mengeluarkan Keputusan No. STR/222/2005 pada tanggal 13 Februari 2005 Tentang ketentuan anggota TNI untuk dicalonkan dalam pemilihan. Bagian terpenting dalam peraturan ini adalah di pasal 4, yang menegaskan sikap netralitas militer dan tidak ada keterlibatan dalam pemilu. Anggota militer aktif tidak diperkenankan meninggalkan komentar maupun arahan terkait dengan memenangkan kursi serta dilarang menempatkan materi kampanye untuk instalasi militer dan kepemimpinan militer di daerah setempat.⁴³

⁴² Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 67

⁴³ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 68

Mantan elite militer yang berkecimpung di dunia politik memilih sebagai legislator independent di parlemen tanpa banyak intervensi dari institusi militer. Di sisi lain, kurangnya pengaruh militer dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen mengundang purnawirawan TNI/Polri untuk mencoba mempertahankan pengaruhnya dengan cara bergabung ke dalam partai politik. Dari dataset yang dikumpulkan dari tahun 1998 hingga 2014, setidaknya terdapat 388 purnawirawan memasuki kompetisi politik. Jika dikasifikasikan partisipasi mereka diantaranya:

1. Terdaftar sebagai pengurus dan anggota partai politik.
2. Hanya mencalonkan diri dalam pemilihan melalui partai politik atau jalur independent.
3. Terlibat sebagai tim sukses dalam pemilihan presiden.⁴⁴

Pada pemilu 1999, partisipasi purnawirawan masih sebesar 0,26% dengan sebagian kecil yang mencalonkan diri yang sebagian besar dari PDI-P. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan partisipasi purnawirawan menjadi 19,85% diikuti oleh pendirian partai-partai baru oleh purnawirawan. Sedangkan pada pemilu tahun 2009, terjadi penurunan tajam terhadap partisipasi purnawirawan menjadi 8,76%. Dalam pemilu 2014, partisipasi purnawirawan kembali mengalami kenaikan menjadi 15,72% yang disebabkan oleh reorganisasi partai-partai mapan yang didukung oleh purnawirawan, seperti Demokrat, Nasdem, Hanura, dan Gerindra.⁴⁵ Partai-partai yang menampung purnawirawan tersebut diberi ruang lebih luas dalam posisi sebagai kandidat legislative. Dalam pemilu 2004-2009 purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintah daerah sedikit meningkat setelah Undang-Undang tentang pemilu diberlakukan. Karena sejumlah besar purnawirawan gagal

⁴⁴ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 85.

⁴⁵ Abdoel Fattah *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005) cetakan pertama, hlm 89-90.

terpilih sebagai anggota parlemen, mereka mengubah orientasi dari pencalonan legislative menjadi kepala daerah.

E. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁶. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil⁴⁷.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ditetapkan dalam Pasal 20 1A ayat (2) UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020⁴⁸, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PKPU tentang tahapan, program dan jadwal menetapkan tanggal 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diakses pada <https://www.dpr.go.id>

⁴⁷ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada <https://www.dpr.go.id>

⁴⁸ Pasal 20 1A ayat (2) UU No.6 Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diakses pada <https://www.dpr.go.id>

F. Kerangka Berpikir

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan atau referensi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini penelitian terdahulu yang memiliki konteks yang hampir serupa dengan penelitian ini:

a) **Wendri**. Judul Penelitian: Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan tentang Calon Gubernur Berlatarbelakang TNI Pada Pilkada 2018). *Jurnal Komunikasi*, Vol.1, No21, 2019.

Hasil penelitian: persepsi masyarakat Kota Medan mengenai calon gubernur berlatarbelakang TNI adalah TNI memiliki penampilan fisik dan komunikasi yang tegas sehingga dapat menciptakan perasaan aman dan nyaman. Sedangkan kepemimpinan gubernur dari kalangan sipil dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu kepemimpinan dari kalangan sipil mudah terjerat kasus korupsi, sehingga masyarakat lebih memilih pemimpin berlatarbelakang TNI pada Pilkada 2018.⁴⁹

b) **Salsabila Larasati**. Judul Penelitian: Militer dan Politik (Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi 2004-2014). Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hasil Penelitian: Anggota militer yang telah menyelesaikan masa jabatannya akan memiliki hak sipilnya kembali, yaitu dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan. Militer mulai memasuki ranah politik disebabkan oleh 2 faktor, factor pertama karena adanya dorongana dari militer dengan melakukan intervensi. Factor kedua karena gagalnya sipil dalam menjalankan pemerintahannya. Seseorang yang memiliki latar belakang

⁴⁹ Wendri, *Jurnal Komunikasi*: “*Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan tentang Calon Gubernur Berlatarbelakang Berlatarbelakang TNI pada Pilkada 2018*”, Vol.1 No.2, diakses pada journal.umsu.ac.id.

militer dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjadi pemimpin, karena mereka memiliki tingkat kedisiplinan dan nasionalisme yang tinggi, memiliki fisik yang kuat dan terlatih, sigap dan tanggap dalam berpikir, memiliki kewaspadaan dalam melangkah dan mengambil keputusan, selain itu mereka juga dianggap dapat dipercaya.⁵⁰

c) **Riswandha Imawan.** Judul Penelitian: Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer Dalam Demokratisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol4, No. 1, Juli 2000. Hasil Penelitian: Sejak gerakan reformasi, pandangan masyarakat terhadap TNI mulai berubah. Masyarakat memandang masalah keamanan dan ketertiban harus diutamakan agar mereka bisa beraktifitas secara normal, agar mampu menjalankan usahanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

d) **Joko Panji Sasongko.** Judul Penelitian: Politik Militer (Studi Kasus Persepsi Sipil Terhadap Partisipasi Politik Purnawirawan di Indonesia Pasca Reformasi). Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Hasil Penelitian: (1) Persepsi sipil terhadap purnawirawan pasca reformasi telah bergeser seiring jalannya proses demokratisasi dan demiliterisasi di Indonesia. (2) Eksistensi purnawirawan dalam politik menimbulkan suatu ironi, upaya demiliterisasi merupakan salah satu agenda penting mengapa reformasi dilakukan, disisi lain hingga kini militerisme seolah dijaga dengan baik dalam kehidupan social dan politik. (3) Seiring ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 yang melarang militer

⁵⁰ Salsabila Larasati, Skripsi: “*Militer dan Politik (Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi 2004-2014)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

aktif terlibat dalam politik praktis, purnawirawan menjelma menjadi representasi militer dalam politik.⁵¹

- e) **Deni Yanuar**. Judul Penelitian: *Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas*. AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science Vol.3 No.1, 2017.

Hasil Penelitian: Tanggapan masyarakat terhadap netralitas TNI selama pemilu legislative di Kabupaten Bireuen sudah baik dilihat dari tanggapan yang sangat mendukung atas penerapan netralitas yang diterapkan oleh pihak TNI. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang belum memahami makna netralitas yang dilakukan oleh pihak TNI karena kurangnya sosialisasi serta kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Penerapan yang dilakukan oleh pihak TNI sangat bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat bebas memilih tanpa adanya rasa takut. Dengan begitu netralitas TNI sangat berpengaruh dalam pemilu karena tanpa netralitas TNI dinilai berpeluang melakukan segala macam cara untuk memenangkan pemilu.⁵²

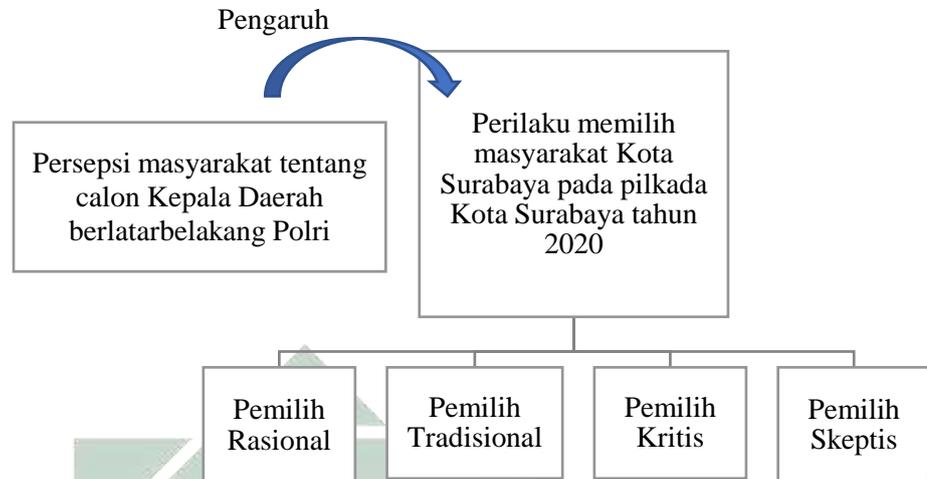
2. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap perilaku memilih yang dianalisis dengan beberapa jenis pemilih, yaitu pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih kritis, dan pemilih skeptis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

⁵¹ Joko Panji Sasongko, Skripsi: *“Politik Militer (Studi Kasus Persepsi Sipil Terhadap Partisipasi Politik Purnawirawan di Indonesia Pasca Reformasi)”*, (Yogyakarta: UGM, 2014)

⁵² Deni Yanuar, Jurnal: *“Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas”*, AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science Vol 3 No.1, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), diakses pada scholar.google.co.id.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Tiap pribadi masyarakat tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda akan calon kepala daerah berlatarbelakang Polri. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya akan mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat saat menentukan pilihannya. Perilaku pemilih terbagi menjadi empat tipe, diantaranya; pemilih rasional; pemilih kritis; pemilih tradisional; dan pemilih skeptis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik.⁵³ Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena fokus penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dimana penelitian korelasional merupakan penelitian yang digunakan untuk menguji perbedaan karakteristik dan hubungan dari dua variable atau lebih.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang dikaji adalah hubungan dari persepsi dengan perilaku memilih masyarakat.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Surabaya yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi KPU Kota Surabaya, jumlah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 lalu adalah sebanyak 1.098.469 orang yang terdiri dari 507.496 orang laki-laki dan 590.973 orang perempuan.⁵⁵ Lebih jelasnya, peneliti akan merincikan kedalam tabel dibawah ini:

⁵³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), edisi pertama, hlm 43.

⁵⁴ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), cetakan pertama, hlm 7.

⁵⁵ Website resmi KPU Kota Surabaya, <https://kpu-surabayakota.go.id> 30.187

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

Dapil	Kecamatan	Jumlah Pemilih
Dapil 1	Bubutan	37.077
	Genteng	21.201
	Gubeng	49.308
	Krembangan	45.048
	Simokerto	32.971
	Tegalsari	34.984
	Kenjeran	60.444
Dapil 2	Pabean Cantikan	25.568
	Semampir	61.591
	Tambaksari	81.990
	Bulak	16.639
Dapil 3	Gununganyar	22.700
	Mulyorejo	29.207
	Rungkut	45.072
	Sukolilo	39.339
	Tenggilis Mejoyo	22.646
	Wonocolo	30.187
	Gayungan	15.667
Dapil 4	Jambangan	19.876
	Sawahan	77.004
	Sukomanunggal	39.195
	Wonokromo	57.608
	Asemrowo	17.436
Dapil 5	Benowo	28.109
	Dukuhpakis	21.208
	Karangpilang	28.769
	Lakarsantri	23.151
	Pakal	25.331

Sambikerep	25.246
Tandes	36.550
Wiyung	27.347
Jumlah Populasi	1.098.469

Sumber: Website KPU Kota Surabaya

2. Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus penentuan sampel Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Dalam penelitian ini besar e ditetapkan 10%, maka dapat diperhitungkan jumlah sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1.098.469}{1+1.098.469 (10\%)^2} = 99,99, \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

berdasarkan hasil penghitungan rumus sampel di atas, dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

3. Teknik Sampling

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik cluster sampling (area sampling). Teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti penduduk dari suatu negara, propinsi dan/atau kabupaten/kota.⁵⁶ Teknik ini digunakan peneliti karena sumber data

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), cetakan pertama, hlm 131

berasal dari daerah yang luas dengan berbagai latar belakang, yaitu mencakup seluruh wilayah Kota Surabaya.

Untuk menentukan sampel di tiap kecamatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus presentase, yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times n$$

Keterangan:

P = Jumlah responden/sampel tiap kecamatan

N = Populasi

n = Jumlah sampel

Adapun hasil penentuan sampel di tiap kecamatan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian di Tiap Kecamatan

DAPIK	KECAMATAN	PENGAMBILAN SAMPEL	JUMLAH SAMPEL
Dapil 1	Bubutan	$\frac{37.077}{1.098.469} \times 100$	3,37 (3)
	Genteng	$\frac{21.201}{1.098.469} \times 100$	1,93 (2)
	Gubeng	$\frac{49.308}{1.098.469} \times 100$	4,48 (4)
	Krembangan	$\frac{45.048}{1.098.469} \times 100$	4,10 (4)
	Simokerto	$\frac{32.971}{1.098.469} \times 100$	3,00 (3)
Dapil 2	Tegalsari	$\frac{34.984}{1.098.469} \times 100$	3,18 (3)
	Kenjeran	$\frac{60.444}{1.098.469} \times 100$	5,50 (6)

	Pabean Cantikan	$\frac{25.568}{1.098.469} \times 100$	2,32 (2)
	Semampir	$\frac{61.591}{1.098.469} \times 100$	5,60 (6)
	Tambaksari	$\frac{81.990}{1.098.469} \times 100$	7,46 (7)
Dapil 3	Bulak	$\frac{16.639}{1.098.469} \times 100$	1,51 (2)
	Gununganyar	$\frac{22.700}{1.098.469} \times 100$	2,06 (2)
	Mulyorejo	$\frac{29.207}{1.098.469} \times 100$	2,65 (3)
	Rungkut	$\frac{45.072}{1.098.469} \times 100$	4,10 (4)
	Sukolilo	$\frac{39.339}{1.098.469} \times 100$	3,58 (4)
	Tenggilis Mejoyo	$\frac{22.646}{1.098.469} \times 100$	2,06 (2)
	Wonocolo	$\frac{30.187}{1.098.469} \times 100$	2,74 (3)
Dapil 4	Gayungan	$\frac{15.667}{1.098.469} \times 100$	1,42 (1)
	Jambangan	$\frac{19.876}{1.098.469} \times 100$	1,80 (2)
	Sawahan	$\frac{77.004}{1.098.469} \times 100$	7,01 (7)
	Sukomanunggal	$\frac{39.195}{1.098.469} \times 100$	3,56 (4)
	Wonokromo	$\frac{57.608}{1.098.469} \times 100$	5,24 (5)

Dapil 5	Asemrowo	$\frac{17.436}{1.098.469} \times 100$	1,58 (2)
	Benowo	$\frac{28.109}{1.098.469} \times 100$	2,55 (3)
	Dukuhpakis	$\frac{21.208}{1.098.469} \times 100$	1,93 (2)
	Karangpilang	$\frac{28.769}{1.098.469} \times 100$	2,61 (3)
	Lakarsantri	$\frac{23.151}{1.098.469} \times 100$	2,10 (2)
	Pakal	$\frac{25.331}{1.098.469} \times 100$	2,30 (2)
	Sambikerep	$\frac{25.246}{1.098.469} \times 100$	2,29 (2)
	Tandes	$\frac{36.550}{1.098.469} \times 100$	3,32 (3)
	Wiyung	$\frac{27.347}{1.098.469} \times 100$	2,48 (2)
	JUMLAH SAMPEL		100

C. Variabel dan Indikator Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variable bebas/independent (X) dan variable terikat/dependen (Y). Dalam penelitian ini variable X adalah persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri, dan variable Y adalah perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Adapun indikator dari variable Y:

Tabel 3. 3 Variabel X

VARIABEL	INDIKATOR
Persepsi Masyarakat Tentang Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri	Persepsi Positif Persepsi Negatif

Tabel 3. 4 Variabel Y

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Perilaku Masyarakat Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020	Memilih Pemilih Rasional	Memilih karena visi dan misi calon Walikota dan Wakil Walikota. Memilih karena kinerja atau pengalaman Calon Walikota dan Wakil Walikota.
	Memilih Tradisional	Memilih karena kualitas atau kompetensi Calon Walikota dan Wakil Walikota. Memilih karena latar belakang calon Walikota dan Wakil Walikota. Memilih karena mengikuti pilihan mayoritas di lingkungan tempat tinggal/keluarga/warga sekitar. Memilih karena mengikuti pilihan Ketua

RT/RW/Kepala

Desa/Lurah/Kyai/Tokoh

Agama/Tokoh

Masyarakat.

Memilih karena menganut kepercayaan yang sama dengan Calon Walikota/Wakil

Walikota.

Memilih karena berasal dari daerah dan suku bangsa/etnis yang sama dengan Calon

Walikota/Wakil

Walikota.

Memilih karena gender/jenis kelamin Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Memilih karena penampilan fisik Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Memilih karena figure pribadi calon Walikota dan Wakil Walikota

Pemilih Kritis

Memilih karena partai politik pengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pemilih Skeptis	Memilih karena imbalan uang atau barang.
	Memilih karena asal pilih

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kota Surabaya dengan sasaran responden masyarakat Kota Surabaya yang telah mengikuti Pemilihan Walikota Surabaya pada tanggal 9 Desember 2020. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan masih berada pada satu tempat dengan kota tinggal peneliti dan perguruan tinggi tempat peneliti mengenyam pendidikan. Selain itu belum ada yang melakukan penelitian dengan judul yang diangkat oleh peneliti di Kota Surabaya. Sedangkan untuk waktu penelitian ini dilakukan setelah Pemilihan Walikota-Wakil Walikota 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pencarian data dari berbagai sumber data penelitian yang mana sumber data merupakan tempat dimana peneliti bisa mendapat data penelitian.⁵⁷ Untuk mendapatkan data penelitian terkait pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatar belakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa penunjang yang didapat dari penelitian terdahulu maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun rincian dari ketiga teknik data primer tersebut adalah:

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini dilakukan karena dalam

⁵⁷ Basilisu Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Capulis, 2015), hlm 109.

pelaksanaan observasi dilakukan proses-proses pengamatan penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia.⁵⁸ Penulis menggunakan observasi untuk menyuguhkan perilaku yang nyata tentang persepsi masyarakat mengenai calon pemimpin politik atau calon kepala daerah berlatarbelakang Polri dan pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Observasi akan dilakukan langsung dengan cara mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui persepsi dan perilaku memilih masyarakat.

2. Kuesioner (online), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban.⁵⁹ Angket dapat memberikan gambaran dari jawaban yang diberikan responden, baik itu kuesioner terbuka maupun tertutup/anonym. Penyebaran angket bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon pemimpin politik berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Angket akan disebarakan secara online menggunakan media google formulir. Hal ini dilakukan karena penelitian dilakukan saat terjadinya pandemic Covid-19.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen yang bersifat pribadi dan resmi sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk ditafsirkan. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data empiric yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Data ini berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini teknik ini digunakan untuk menggali data terkait jumlah

⁵⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm 145.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), cetakan pertama, hlm 199.

⁶⁰ Ning Aneu Yuriawati, *Optimalisasi Peran Strategis Pelayanan di Wilayah Kecamatan Dalam Mendukung Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), diakses pada repository.upi.edu, hlm 62-63

populasi penelitian yang didapat dari website resmi KPU Kota Surabaya dan untuk memaparkan kuesioner responden.

F. Tahapan Penelitian

1. Pra Penelitian

Pada tahap pra penelitian ini berisikan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum peneliti terjun melakukan penelitian. Penyusunan rancangan penelitian, pertimbangan konsep dan teori, biaya dan logistik penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Dalam tahap pra penelitian, yang pertama dilakukan adalah memilih masalah, menentukan judul, dan tempat atau lokasi penelitian dengan tujuan menyesuaikan keperluan dan kepentingan fokus penelitian yang akan diteliti. Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Kota Surabaya dengan pertimbangan keseriusan masalah, waktu, tenaga, biaya, minat dan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga memungkinkan penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut. Langkah selanjutnya penulis meminta persetujuan dosen pembimbing dalam menentukan judul serta melakukan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran awal tentang masalah yang akan diteliti. Setelah itu, penulis menentukan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian kuantitatif korelasional dan membuat kuesioner untuk disebar kepada responden.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari responden. Selain mengumpulkan hasil penelitian melalui kuesioner, penulis juga memperoleh data melalui penelitian terdahulu, jurnal maupun sumber lain yang relevan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mencari data populasi di website resmi KPU Surabaya
- b. Menghitung sampel
- c. Menyebarkan kuesioner
- d. Menganalisis data

3. Penulisan Penelitian

- a. Tahap pendahuluan. Penelitian diawali dengan pencarian kajian-kajian yang berkaitan dengan judul penelitian. Kajian-kajian ini berupa penelitian terdahulu dan jurnal yang telah dilakukan serta dasar teori yang dapat mendukung penelitian. Setelah itu mendeskripsikan tujuan dan manfaat penelitian, dan menjabarkan definisi-definisi operasional.
- b. Memaparkan landasan teori, yakni menjelaskan secara rinci teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Memaparkan metode penelitian yang digunakan, yang diantaranya terdapat pendekatan dan jenis penelitian; populasi dan sampel; variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- d. Tahap penyajian data, yaitu mendeskripsikan obyek penelitian dan hasil penelitian.
- e. Tahap pembahasan, menganalisis hasil data dari rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga.
- f. Tahap penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistic deskriptif dan inferensial. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan SPSS For Windows dalam menganalisis data. Adapun teknik analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif. Untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan kedua, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Rumusan masalah tersebut adalah:
 - a. Persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon kepala daerah berlatarbelakang POLRI pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
 - b. Perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

Menurut Sugiyono analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau persoalan. Jadi statistika deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala atau persoalan.⁶¹ Setelah semua data sudah terkumpul, penyajian data dibuat dengan tabel dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

f = Jumlah jawaban

n = Jumlah responden

2. Analisis Statistik Inferensial. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ketiga adalah Teknik analisis statistik inferensial. Rumusan masalah tersebut adalah:
 - c. Pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatarbelakang POLRI terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

Statistik inferensial merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan disimpulkan untuk populasi. Statistika inferensial memberikan cara yang objektif guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kuantitatif, serta menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu berdasarkan hasil analisis sampel.⁶² Untuk menganalisis data ini menggunakan SPSS for Windows, yang dirincikan sebagai berikut:

- Analisis Regresi Linear Sederhana

⁶¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2017), cetakan ketiga, hlm 37.

⁶² Yeri Sutopo & Achmad Slamet, *Statistika Inferensial*, (Jakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm 2.

Analisis regresi linear sederhana adalah model analisis yang menyatakan hubungan linear antara dua variable dimana salah satu variable dianggap mempengaruhi variable yang lain. Variable yang mempengaruhi dinamakan variable independent (X) dan variable yang dipengaruhi dinamakan variable dependen (Y).⁶³ output dari analisis ini adalah menggunakan program SPSS dengan rincian sebagai berikut:

a. Deskripsi

Output deskripsi dalam SPSS digunakan untuk mengetahui simpangan baku dan banyaknya data dari masing-masing variable (variable X dan Y).

b. Korelasi

Output korelasi dalam SPSS digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatarbelakang Polri (X) terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 (Y). setelah terkumpul akan ditabulasikan dengan pedoman interpretasi korelasi.

c. Koefisien

Output koefisien dalam SPSS digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan maupun untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁴ Untuk melihat berapa persen tingkat pengaruh persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah berlatarbelakang Polri (X) terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 (Y), peneliti menggunakan Model Summary.

⁶³ Sugiyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 5.

⁶⁴ Nanang Martono, *Statistika Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010) hlm 233-236

- Uji Hipotesis (Uji T)

Setelah data analisis regresi linear sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menganalisa apakah hubungan tersebut berlaku untuk seluruh populasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0.05 ($\alpha=5\%$) penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikan $t < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variable X terhadap variable Y.
- b. Apabila nilai signifikan $t > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variable X terhadap variable Y.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman dengan angket tertutup/pilihan ganda, dimana peneliti memperoleh jawaban secara tegas terhadap pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, dengan skor tertinggi 1 dan terendah 0⁶⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Basilisu Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015) hlm 134.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

1. Kondisi Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara $7^{\circ}9' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36' - 112^{\circ}54'$ Bujur Timur. Batas Wilayah Kota Surabaya adalah:

Sebelah Utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Selat Madura dan Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau sebesar 63,45%, dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Surabaya adalah 19.039 Hektar atau sebesar 36,55%. Secara topografi Kota Surabaya 80% terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut.⁶⁶

Kota Surabaya memiliki kelembapan udara rata-rata minimum 50% dan maksimum 92%. Tekanan udara rata-rata minimum 1012,3 Mbs dan Maksimum 1012,5 Mbs dengan temperature rata-rata minimum 23,6°C dan maksimum 33,8°C. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Nopember-April. Curah hujan rata-rata 165,3 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Januari-Maret dan Nopember-Desember. Struktur tanah Kota Surabaya terdiri dari dari tanah alluvial hasil endapan sungai dan pantai, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Kecepatan angin

⁶⁶ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diakses pada 21 Mei 2021 pada laman dpm-ptsp.surabaya.go.id

daerah Surabaya rata-rata 6,4 knot dan maksimum 20,3 knot. Arah angin terbanyak di setiap bulannya:

Januari : Barat	Juli : Timur
Februari : Barat-Barat Laut	Agustus : Timur
Maret : Barat-Barat Laut	September : Timur
April : Barat-Barat Laut	Oktober : Timur
Mei : Timur	Nopember : Timur-Barat
Juni : Timur	Desember : Barat-Barat Laut ⁶⁷

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Kota Surabaya sebagai daerah hilir merupakan daerah limpahan debit air dari sungai, sehingga menjadi rawan banjir saat musim penghujan.⁶⁸

Secara administrative, Surabaya dibagi menjadi 163 Kelurahan dan 31 Kecamatan (yang terbagi menjadi 5 wilayah) dengan jumlah penduduk mencapai 3,15 juta. Surabaya yang merupakan pemukiman pesisir berpotensi sebagai tempat persinggahan dan pemukiman bagi orang-orang pendatang (imigran), sehingga menjadikan Kota Surabaya sebagai kota dengan berbagai suku bangsa di nusantara seperti Madura, Sunda, Batak, Borneo, Bali, Sulawesi dan Papua. Surabaya juga merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Sebagian besar masyarakat kota Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura.⁶⁹

⁶⁷ Pemerintah Kota Surabaya, diakses pada 21 Mei 2021, pada laman www.surabaya.go.id

⁶⁸ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diakses pada 21 Mei 2021 pada laman dpm-ptsp.surabaya.go.id

⁶⁹ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diakses pada 21 Mei 2021, pada laman jatim.bpk.go.id

2. Kondisi Demografis Kota Surabaya

a. Kependudukan

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, sehingga jumlah penduduk Surabaya bisa terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2020, penduduk Kota Surabaya mencapai 2.874.314 jiwa. Sedangkan di tahun 2019 jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 2.896.195 jiwa.⁷⁰ Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan 21.881 jiwa. Banyak faktor yang memicu perubahan jumlah penduduk, seperti faktor kelahiran dan kematian, urbanisasi, migrasi, merantau karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Berikut data penduduk Kota Surabaya tahun 2020 yang diperoleh berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.425.168
Perempuan	1.449.146
Jumlah Total	2.874.314

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Timur

Menurut tabel 4.1 tentang jumlah penduduk Kota Surabaya di atas, jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2020 adalah 2.874.314 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.425.168 (50%) jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.449.146 (50%) jiwa. Namun dari sekian jumlah di atas tidak seluruhnya memiliki hak pilih pada saat pemilihan umum. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.089.027 jiwa.⁷¹ Lebih rincinya, yaitu:

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, diakses pada 22 Mei 2021, pada laman <https://surabayakota.bps.go.id>

⁷¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, diakses pada 22 Mei 2021, pada laman <https://kpu-surabayakota.go.id>

**Tabel 4. 2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya
Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.016.395
Perempuan	1.072.632
Jumlah Total	2.089.027

Sumber: KPU Kota Surabaya

Menurut tabel 4.2 tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya pada tahun 2020, jumlah DPT Kota Surabaya adalah 2.089.027 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.016.395 (49%) jiwa dan perempuan sebanyak 1.072.632 (51%) jiwa. Namun, tidak semua dari jumlah di atas yang memutuskan untuk memberikan pilihannya pada Pilkada Surabaya 2020. Jumlah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada Pilkada Surabaya tanggal 9 Desember 2020 lalu adalah.⁷²

Tabel 4. 3 Jumlah Pemilih Pilkada Surabaya Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	507.496
Perempuan	590.973
Jumlah Total	1.098.469

Sumber: KPU Kota Surabaya

Menurut tabel 4.3 tentang jumlah pemilih pada Pilkada Surabaya tahun 2020 di atas adalah sebanyak 1.098.469 atau hanya 52% dari jumlah DPT, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 507.496 (46%) dan perempuan sebanyak 590.973 (54%).

⁷² Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, diakses pada 22 Mei 2021, pada laman <https://kpu-surabayakota.go.id>

b. Agama

Surabaya merupakan kota besar dengan penduduk yang beragama dengan berbagai ras, suku, budaya dan agama. Menurut data yang diperoleh dari Kementrian Agama Jawa Timur, penduduk Surabaya mayoritas beragama Islam, dengan jumlah pemeluk sebanyak 2.566.174 orang. Lebih lengkapnya berikut data pemeluk agama penduduk Surabaya berdasarkan jenisnya:⁷³

Tabel 4. 4 Jumlah Pemeluk Agama di Surabaya Tahun 2020

Agama	Jumlah Pemeluk
Islam	2.566.174
Kristen Protestan	275.720
Katolik	120.804
Hindu	8.407
Buddha	45.371
Konghucu	500
Jumlah Total	3.016.976

Menurut tabel 4.4 tentang jumlah pemeluk agama di Surabaya tahun 2020 di atas, jumlah pemeluk agama Islam adalah 2.566.174 (85%) jiwa, Kristen Protestan 275.720 (9%) jiwa, Katolik 120.804 (4%) jiwa, Hindu 8.407 (0.2%) jiwa, Buddha 45.371 (2%) jiwa, dan Konghucu 500 (0.01%) jiwa.

c. Pendidikan

Surabaya memiliki ribuan sekolah negeri maupun swasta. Lebih tepatnya, Surabaya memiliki 1.458 sekolah dari berbagai jenjang tingkatan pendidikan. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

⁷³ <https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2018/12/> diakses pada 23 Mei 2021 pukul 20.10

Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah di Kota Surabaya⁷⁴

Tingkat Pendidikan	Sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
SD	287	527	814
SMP	67	309	376
SMA	23	139	162
SMK	11	95	106
Total			1.458

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

Menurut tabel 4.5 tentang jumlah sekolah di Surabaya di atas, pada tingkat pendidikan SD terdapat 287 sekolah negeri dan 527 sekolah swasta. Pada tingkat pendidikan SMP, terdapat 67 sekolah negeri dan 309 sekolah swasta. Pada tingkat pendidikan SMA, terdapat 23 sekolah negeri dan 139 sekolah swasta. Dan pada tingkat pendidikan SMK terdapat 11 sekolah negeri dan 95 sekolah swasta.

B. Karakteristik Responden

Responden yang menjadi fokus penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kecamatan, dan agama. Lebih jelasnya dari beberapa karakteristik tersebut disajikan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	PRESENTASE	FREKUENSI
Laki-Laki	46%	46
Perempuan	54%	54
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

⁷⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 22 Mei 2021 pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id

Tabel 4. 7 Jumlah Responden Berdasarkan Usia

USIA	PRESENTASE	FREKUENSI
17 – 22 Tahun	57%	57
23 – 30 Tahun	21%	21
31- 40 Tahun	6%	6
41 – 52 Tahun	12%	12
53 – 71 Tahun	4%	4
Lebih dari 71 Tahun	-	-
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 8 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	PRESENTASE	FREKUENSI
Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	2%	2
SD	1%	1
SMP	6%	6
SMA/SMK	71%	71
Akademi/Diploma	6%	6
S1/Lebih Tinggi	14%	14
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 9 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN	PRESENTASE	FREKUENSI
Buruh	7%	7
Pengajar (Guru/Dosen)	1%	1

Ibu Rumah Tangga	4%	4
Pelajar/Mahasiswa	44%	44
Pedagang Kecil	4%	4
Pegawai Negeri Sipil	-	-
Karyawan Swasta	20%	20
Pejabat (Lurah, Camat, DPRD, dll)	-	-
Pengusaha	-	-
Pensiunan	-	-
Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	3%	3
Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur)	8%	8
Wiraswasta	9%	9
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 10 Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan

DAPIL	KECAMATAN	PRESENTASE	FREKUENSI
Dapil 1	Bubutan	3%	3
	Genteng	2%	2
	Gubeng	4%	4
	Krembangan	4%	4
	Simokerto	3%	3
	Tegalsari	3%	3
	Dapil 2	Kenjeran	6%
Pabean Cantikan		2%	2
Semampir		6%	6
Tambaksari		7%	7
Dapil 3	Bulak	2%	2

	Gunung Anyar	2%	2
	Mulyorejo	3%	3
	Rungkut	4%	4
	Sukolilo	4%	4
	Tenggilis Mejoyo	2%	2
	Wonocolo	3%	3
Dapil 4	Gayungan	1%	1
	Jambangan	2%	2
	Sawahan	7%	7
	Sukomanunggal	4%	4
	Wonokromo	5%	5
Dapil 5	Asemrowo	2%	2
	Benowo	3%	3
	Dukuhpakis	2%	2
	Karangpilang	3%	3
	Lakarsantri	2%	2
	Pakal	2%	2
	Sambikerep	2%	2
	Tandes	3%	3
	Wiyung	2%	2
Total		100 %	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 11 Jumlah Responden Berdasarkan Agama

AGAMA	PRESENTASE	FREKUENSI
Islam	95%	95
Kristen Protestan	3%	3
Katolik	1%	1
Hindu	1%	1
Buddha	-	-

Konghucu	-	-
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

C. Penyajian Data

Setelah memaparkan karakteristik responden, selanjutnya akan dipaparkan penyajian data meliputi pengetahuan akan informasi calon pemimpin politik atau calon kepala daerah yang memiliki latarbelakang Polri seperti visi misi dan pendapat responden tentang beliau. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai partisipasi responden pada pemilihan Walikota Surabaya 2020, alasan responden memilih calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pilihan responden, dan sifat/kriteria calon pemimpin yang diharapkan untuk Surabaya lima tahun kedepan. Seluruh informasi dari pertanyaan tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12 Calon Walikota Surabaya

(P1) Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui Calon Walikota Surabaya Machfud Arifin (Calon no urut 2)?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	100%	100
Tidak	-	-
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 13 Calon Kepala Daerah Berlatar Belakang Polri

(P2) Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu bahwa Machfud Arifin adalah seorang mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Jawa Timur)?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	47%	47
Tidak	53%	53
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 14 Visi Misi dan Program Kerja Machfud Arifin

(P3) Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu Visi Misi dan Program Kerja Beliau?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	54%	54
Tidak	46%	46
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 15 Persepsi Responden Terhadap Machfud Arifin

Pertanyaan	Jawaban		Total
	Ya	Tidak	
(P4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang alim (religius)?	7	93	100
(P5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang berpengalaman dan berprestasi?	46	54	100
(P6) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang bijaksana/berwibawa dan tegas?	56	44	100
(P7) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang pintar/cerdas dan kreatif/inovatif?	12	88	100
(P8) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang Jujur/Berintegritas?	11	89	100

(P9) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang santun dan peduli/merakyat?

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 16 Machfud Arifin Sebagai Walikota Surabaya

(P10) Menurut Bapak/Ibu/Saudara Machfud Arifin pantas untuk menjadi Walikota Surabaya?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	52%	52
Tidak	48%	48
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 17 Latar belakang Calon Kepala Daerah

(P11) Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan memilih Calon Walikota yang memiliki latar belakang apapun (sipil maupun militer tidak masalah)?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	72%	72
Tidak	28%	28
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 18 Latar belakang Calon Kepala Daerah

(P12) Apakah Bapak/Ibu/Saudara hanya akan memilih Calon Walikota yang memiliki latar belakang sipil (bukan TNI/Polri)?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	25%	25

Tidak	75%	75
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 19 Latar belakang Calon Kepala Daerah

(P13) Apakah Bapak/Ibu/Saudara hanya akan memilih Calon Walikota yang memiliki latar belakang militer

(TNI/Polri)?

Jawaban	Presentase	Frekuensi
Ya	3%	3
Tidak	97%	97
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 20 Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Surabaya 2020

(P14) Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengikuti Pilkada Kota Surabaya pada tanggal 9 Desember 2020 lalu?

Pilihan	Presentase	Frekuensi
Ya	100%	100
Tidak	-	-
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 21 Presentase Pilihan Pada Pemilihan Walikota Surabaya 2020

(P15) Pada Pilkada Walikota Surabaya tanggal 9 Desember 2020 lalu, apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih Eri Cahyadi-Armuji sebagai Walikota-Wakil Walikota Surabaya?

Pilihan	Presentase	Frekuensi
Ya	32%	32
Tidak/Rahasia	68%	68

Total 100% 100
 (P16) Pada Pilkada Walikota Surabaya tanggal 9 Desember 2020 lalu,
 apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih Machfud Arifin-Mujiaman sebagai
 Walikota-Wakil Walikota Surabaya?

Pilihan	Presentase	Frekuensi
Ya	24%	24
Tidak/Rahasia	76%	76
Total	100%	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Pada tabel 4.21 tentang persentase pilihan pada pemilihan Walikota Surabaya 2020, dengan pertanyaan (P15) “Pada Pilkada Walikota Surabaya tanggal 9 Desember 2020 lalu, apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih Eri Cahyadi-Armuji sebagai Walikota-Wakil Walikota Surabaya?” 32 orang menjawab “**Ya**” dan 68 orang menjawab “**Tidak/Rahasia**”. Pada pertanyaan (P16) “Pada Pilkada Walikota Surabaya tanggal 9 Desember 2020 lalu, apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih Machfud Arifin-Mujiaman sebagai Walikota-Wakil Walikota Surabaya? 24 orang menjawab “**Ya**” dan 76 orang menjawab “**Tidak/Rahasia**”. Sehingga diketahui 44 orang sisanya memilih untuk merahasiakan pilihannya pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 lalu.

Tabel 4. 22 Alasan Responden Memilih Calon Walikota

Pertanyaan	Jawaban		Total
	Setuju	Tidak	
(P17) Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena calon diusung oleh partai pilihan?	8	92	100
(P18) Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena mengikuti pilihan mayoritas di lingkungan tempat tinggal/keluarga/warga sekitar?	29	71	100

(P19)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena mengikuti pilihan Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah/Kyai/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat?	5	95	100
(P20)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena figure dan/atau pribadi calon Walikota dan Wakil Walikota itu sendiri?	41	59	100
(P21)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena latar belakang calon Walikota-Wakil Walikota itu sendiri?	11	89	100
(P22)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena imbalan berupa uang/barang?	8	92	100
(P23)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mantab memilih calon Walikota-Wakil Walikota karena visi misi dan program kerja calon Walikota-Wakil Walikota?	56	44	100
(P24)	Apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih calon Walikota-Wakil Walikota tersebut karena hanya asal pilih?	2	98	100

Sumber: Kuesioner

Tabel 4. 23 Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Responden

Jawaban	Setuju	Tidak	Total
(P25) Apakah agama yang dianut calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	26	74	100
(P26) Apakah asal daerah dan suku bangsa/etnis calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	1	99	100
(P27) Apakah gender/jenis kelamin calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	1	99	100
(P28) Apakah karakter personal (tegas, santun, dll) calon Wakilota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	55	45	100
(P29) Apakah kinerja dan pengalaman calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	62	38	100
(P30) Apakah kualitas/kompetensi calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	51	49	100
(P31) Apakah penampilan fisik (tampan atau cantik) calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?	9	91	100

(P32) Apakah visi misi dan program kerja calon Walikota-Wakil Walikota merupakan faktor yang paling mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Tabel 4. 24 Perilaku Memilih Masyarakat

Jenis Pemilih	Faktor yang Mempengaruhi	Jawaban	
		Setuju	Tidak
Rasional	Visi Misi & Program Kerja Kandidat	56	44
	Kinerja & Pengalaman Kandidat	62	38
	Kualitas / Kompetensi	51	49
Kritis	Partai Politik Pengusung Kandidat	8	92
Tradisional	Mengikuti Pilihan Mayoritas Tempat Tinggal / Keluarga / Warga Sekitar	29	71
	Mengikuti Pilihan Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah/Kyai/Tokoh Masyarakat	5	95
	Figure Pribadi Kandidat	41	59
	Latar Belakang Kandidat	11	89
	Agama yang Dianut Kandidat	26	74
	Asal Daerah dan Suku Bangsa Kandidat	1	99
	Gender/Jenis Kelamin Kandidat	1	99
	Karakter Personal Kandidat	55	45
	Penampilan Fisik Kandidat	9	91
	Skeptis	Imbalan Uang/Barang	8
Asal Memilih		2	98

Sumber: Kuesioner (google formulir)

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Persepsi Masyarakat Kota Surabaya Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Persepsi menurut Robbins,⁷⁵ bahwa “persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.” Sehingga dapat ditafsirkan bahwa persepsi adalah suatu upaya untuk melihat serta memahami pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya berdasarkan apa yang telah dirasakan oleh dirinya. Persepsi tidak berupaya untuk mencari sesuatu yang dapat dikatakan tepat atau benar, namun persepsi hanya berupa penafsiran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada penelitian ini, objek dari persepsi itu sendiri adalah masyarakat Kota Surabaya yang akan memberikan pendapatnya tentang calon kepala daerah berlatarbelakang Polri pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020.

Tabel 5. 1 Persepsi Masyarakat Terhadap Machfud Arifin

Pertanyaan	Jawaban		Total
	Setuju	Tidak	
(P4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang alim (religius)?	7	93	100
(P5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang berpengalaman dan berprestasi?	46	54	100
(P6) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang bijaksana/berwibawa dan tegas?	56	44	100

⁷⁵ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm 75.

(P7) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang pintar/cerdas dan kreatif/inovatif?	12	88	100
(P8) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang Jujur/Berintegritas?	11	89	100
(P9) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Machfud Arifin merupakan seorang yang santun dan peduli/merakyat?	68	32	100

Sumber: Kuesioner (google formulir)

Melihat hasil rata-rata dari jawaban “Tidak Setuju” (67%) lebih besar dibandingkan rata-rata dari jawaban “Setuju” (33%), dapat diketahui hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas persepsi masyarakat Surabaya terhadap calon kepala daerah Machfud Arifin tergolong kurang baik atau persepsi negatif..

Analisis Crosstabs

Tabel 5. 2 Persepsi Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin * Persepsi Crosstabulation

			Alim Religius		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	2	44	46
		% of Total	2,0%	44,0%	46,0%
	Perempuan	Count	5	49	54
		% of Total	5,0%	49,0%	54,0%
Total		Count	7	93	100
		% of Total	7,0%	93,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 2 atau 2,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 44 atau 44,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju

sebanyak 5 atau 5,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 49 atau 49,0%.

			Berpengalaman Berprestasi		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	26	20	46
		% of Total	26,0%	20,0%	46,0%
	Perempuan	Count	20	34	54
		% of Total	20,0%	34,0%	54,0%
Total		Count	46	54	100
		% of Total	46,0%	54,0%	100,0%

Berdasarkan table uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 26 atau 26,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 20 atau 20,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju sebanyak 20 atau 20,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 34 atau 54,0%.

			Berwibawa dan Tegas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	24	22	46
		% of Total	24,0%	22,0%	46,0%
	Perempuan	Count	32	22	54
		% of Total	32,0%	22,0%	54,0%
Total		Count	56	44	100
		% of Total	56,0%	44,0%	100,0%

Berdasarkan table uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 24 atau 24,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 22 atau 22,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju sebanyak 32 atau 32,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 22 atau 22,0%.

			Kreatif Inovatif		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	9	37	46
		% of Total	9,0%	37,0%	46,0%
	Perempuan	Count	3	51	54
		% of Total	3,0%	51,0%	54,0%
Total		Count	12	88	100
		% of Total	12,0%	88,0%	100,0%

Berdasarkan table uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 9 atau 9,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 37 atau 37,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju sebanyak 3 atau 3,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 51 atau 51,0%.

			Jujur Berintegritas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	7	39	46
		% of Total	7,0%	39,0%	46,0%
	Perempuan	Count	4	50	54
		% of Total	4,0%	50,0%	54,0%
Total		Count	11	89	100
		% of Total	11,0%	89,0%	100,0%

Berdasarkan table uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 7 atau 7,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 39 atau 39,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju sebanyak 4 atau 4,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 50 atau 50,0%.

			Peduli Masyarakat		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	33	13	46
		% of Total	33,0%	13,0%	46,0%
	Perempuan	Count	35	19	54
		% of Total	35,0%	19,0%	54,0%
Total		Count	68	32	100
		% of Total	68,0%	32,0%	100,0%

Berdasarkan table uji Crosstab di atas diketahui jenis kelamin laki-laki pada persepsi setuju sebanyak 33 atau 33,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 13 atau 13,0%. Jenis kelamin perempuan pada persepsi setuju sebanyak 35 atau 35,0%, sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 19 atau 19,0%.

Berdasarkan hasil dari table uji crosstabs pada kategori jenis kelamin di atas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Surabaya yang memiliki persepsi negatif berada pada kategori perempuan, yaitu sebesar 37% dan laki-laki 29% dengan rincian:

Jenis Kelamin	Jawaban "Setuju"	Jawaban "Tidak Setuju"
Laki-laki	17%	29%
Perempuan	16%	38%

Tabel 5. 3 Persepsi Masyarakat Berdasarkan Usia

Usia * Persepsi Crosstabulation

			Alim Religius		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	5	52	57
		% of Total	5,0%	52,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	1	20	21
		% of Total	1,0%	20,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	0	6	6
		% of Total	0,0%	6,0%	6,0%

41-52 tahun	Count	1	11	12
	% of Total	1,0%	11,0%	12,0%
53-71 tahun	Count	0	4	4
	% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
Total	Count	7	93	100
	% of Total	7,0%	93,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 52 atau 52,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 20 atau 20,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 11 atau 11,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%.

			Berpengalaman Berprestasi		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	27	30	57
		% of Total	27,0%	30,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	9	12	21
		% of Total	9,0%	12,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	3	3	6
		% of Total	3,0%	3,0%	6,0%
	41-52 tahun	Count	5	7	12
		% of Total	5,0%	7,0%	12,0%
	53-71 tahun	Count	2	2	4
		% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
Total		Count	46	54	100
		% of Total	46,0%	54,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 27 atau 27,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 30 atau 30,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 9 atau 9,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 12 atau 12,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%.

			Berwibawa dan Tegas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	37	20	57
		% of Total	37,0%	20,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	8	13	21
		% of Total	8,0%	13,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	3	3	6
		% of Total	3,0%	3,0%	6,0%
	41-52 tahun	Count	5	7	12
		% of Total	5,0%	7,0%	12,0%
	53-71 tahun	Count	3	1	4
		% of Total	3,0%	1,0%	4,0%
Total		Count	56	44	100
		% of Total	56,0%	44,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 37 atau 37,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 20 atau 20,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 8 atau 8,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 13 atau 13,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi

tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%.

			Kreatif Inovatif		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	7	50	57
		% of Total	7,0%	50,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	3	18	21
		% of Total	3,0%	18,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	2	4	6
		% of Total	2,0%	4,0%	6,0%
	41-52 tahun	Count	0	12	12
		% of Total	0,0%	12,0%	12,0%
	53-71 tahun	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
Total		Count	12	88	100
		% of Total	12,0%	88,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 51 atau 51,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 18 atau 18,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 12 atau 12,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%.

			Jujur Berintegritas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	6	51	57
		% of Total	6,0%	51,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	4	17	21
		% of Total	4,0%	17,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	0	6	6
		% of Total	0,0%	6,0%	6,0%
	41-52 tahun	Count	0	12	12
		% of Total	0,0%	12,0%	12,0%
	53-71 tahun	Count	1	3	4
		% of Total	1,0%	3,0%	4,0%
Total		Count	11	89	100
		% of Total	11,0%	89,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 51 atau 51,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 17 atau 17,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 12 atau 12,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%.

			Peduli Masyarakat		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Usia	17-22 tahun	Count	41	16	57
		% of Total	41,0%	16,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	13	8	21
		% of Total	13,0%	8,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	3	3	6
		% of Total	3,0%	3,0%	6,0%

41-52 tahun	Count	9	3	12
	% of Total	9,0%	3,0%	12,0%
53-71 tahun	Count	2	2	4
	% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
Total	Count	68	32	100
	% of Total	68,0%	32,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 41 atau 41,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 16 atau 16,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 13 atau 13,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 8 atau 8,0%. Usia 31-40 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Usia 41-52 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 9 atau 9,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Usia 53-71 tahun pada Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%.

Berdasarkan hasil dari tabel uji crosstabs pada kategori usia di atas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Surabaya yang memiliki persepsi negatif berada pada kategori usia 17-22 Tahun, yaitu sebesar 36% dengan rincian:

Usia	Jawaban "Setuju"	Jawaban "Tidak Setuju"
17-22 Tahun	21%	36%
23-30 Tahun	6%	15%
31-40 Tahun	2%	4%
41-52 Tahun	3%	9%
53-71 Tahun	1%	3%

Tabel 5. 4 Persepsi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Alim Religius		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	0	2	2
	SD	% of Total	0,0%	2,0%	2,0%
	SD	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	SMP	Count	0	6	6
		% of Total	0,0%	6,0%	6,0%
	SMA/SMK	Count	4	67	71
		% of Total	4,0%	67,0%	71,0%
	Akademi/Diploma	Count	2	4	6
		% of Total	2,0%	4,0%	6,0%
	S1/Lebih Tinggi	Count	1	13	14
		% of Total	1,0%	13,0%	14,0%
	Total	Count	7	93	100
		% of Total	7,0%	93,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 67 atau 67,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 13 atau 13,0%.

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Berpengalaman & Berprestasi		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	0	2	2
	SD	% of Total	0,0%	2,0%	2,0%
	SD	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	SMP	Count	4	2	6
		% of Total	4,0%	2,0%	6,0%
	SMA/SMK	Count	32	39	71
		% of Total	32,0%	39,0%	71,0%
	Akademi/Diploma	Count	5	1	6
		% of Total	5,0%	1,0%	6,0%
	S1/Lebih Tinggi	Count	5	9	14
		% of Total	5,0%	9,0%	14,0%
	Total	Count	46	54	100
		% of Total	46,0%	54,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 32 atau 32,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 39 atau 39,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 9 atau 9,0%.

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Berwibawa & Tegas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	2	0	2
	SD	% of Total	2,0%	0,0%	2,0%
	SD	Count	1	0	1
		% of Total	1,0%	0,0%	1,0%
	SMP	Count	3	3	6
		% of Total	3,0%	3,0%	6,0%
	SMA/SMK	Count	41	30	71
		% of Total	41,0%	30,0%	71,0%
	Akademi/Diploma	Count	3	3	6
		% of Total	3,0%	3,0%	6,0%
	S1/Lebih Tinggi	Count	6	8	14
		% of Total	6,0%	8,0%	14,0%
	Total	Count	56	44	100
		% of Total	56,0%	44,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 41 atau 41,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 30 atau 30,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 8 atau 8,0%.

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Kreatif Inovatif		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	0	2	2
	SD	% of Total	0,0%	2,0%	2,0%
SD		Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
SMP		Count	1	5	6
		% of Total	1,0%	5,0%	6,0%
SMA/SMK		Count	8	63	71
		% of Total	8,0%	63,0%	71,0%
Akademi/Diploma		Count	1	5	6
		% of Total	1,0%	5,0%	6,0%
S1/Lebih Tinggi		Count	2	12	14
		% of Total	2,0%	12,0%	14,0%
Total		Count	12	88	100
		% of Total	12,0%	88,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 8 atau 8,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 63 atau 63,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 12 atau 12,0%.

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Jujur Berintegritas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	0	2	2
	SD	% of Total	0,0%	2,0%	2,0%
SD		Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
SMP		Count	1	5	6
		% of Total	1,0%	2,0%	6,0%
SMA/SMK		Count	6	65	71
		% of Total	6,0%	65,0%	71,0%
Akademi/Diploma		Count	2	4	6
		% of Total	2,0%	4,0%	6,0%
S1/Lebih Tinggi		Count	2	12	14
		% of Total	2,0%	12,0%	14,0%
Total		Count	11	89	100
		% of Total	11,0%	89,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 63 atau 63,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 12 atau 12,0%.

Pendidikan_Terakhir * Persepsi Crosstabulation

			Peduli Masyarakat		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	2	0	2
	SD	% of Total	2,0%	0,0%	2,0%
SD		Count	1	0	1
		% of Total	1,0%	0,0%	1,0%
SMP		Count	6	0	6
		% of Total	6,0%	0,0%	6,0%
SMA/SMK		Count	45	26	71
		% of Total	45,0%	26,0%	71,0%
Akademi/Diploma		Count	5	1	6
		% of Total	5,0%	1,0%	6,0%
S1/Lebih Tinggi		Count	9	5	14
		% of Total	9,0%	6,0%	14,0%
Total		Count	68	32	100
		% of Total	68,0%	32,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Pada Pendidikan SD Persepsi setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Kemudian, SMP Persepsi Setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Pendidikan SMA/SMK Persepsi Setuju sebanyak 45 atau 45,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 26 atau 26,0%. Pendidikan Akademi/Diploma Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi Persepsi Setuju sebanyak 9 atau 9,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%.

Berdasarkan hasil dari table uji crosstabs pada kategori pendidikan terakhir di atas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Surabaya yang memiliki persepsi

negatif berada pada kategori pendidikan SMA/SMK , yaitu sebesar 48% dengan rincian:

Pendidikan Terakhir	Jawaban “Setuju”	Jawaban “Tidak Setuju”
Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	-	1%
SD	-	1%
SMP	3%	4%
SMA/SMK	23%	48%
Akademi/Diploma	3%	3%
S1/Lebih Tinggi	4%	10%

Tabel 5. 5 Persepsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

			Alim Religius		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pekerjaan	Buruh	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	7,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	5	37	44
		% of Total	5,0%	37,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Karyawan swasta	Count	1	19	20
		% of Total	1,0%	19,0%	20,0%
	Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	1	2	3
		% of Total	1,0%	2,0%	3,0%
	Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	0	8	8
		% of Total	0,0%	8,0%	8,0%
	Wiraswasta	Count	0	9	9
		% of Total	0,0%	9,0%	9,0%
Total		Count	7	93	100

% of Total	7,0%	93,0%	100,0%
------------	------	-------	--------

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 37 atau 37,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 19 atau 19,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 8 atau 8,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 9 atau 9,0%.

Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

			Berpengalaman dan Berprestasi		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pekerjaan	Buruh	Count	3	4	7
		% of Total	3,0%	4,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	1	3	4
		% of Total	1,0%	4,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	20	24	44
		% of Total	20,0%	22,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	2	2	4
		% of Total	2,0%	2,0%	4,0%

Karyawan swasta	Count	11	9	20
	% of Total	11,0%	9,0%	20,0%
Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	2	1	3
	% of Total	2,0%	1,0%	3,0%
Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	2	6	8
	% of Total	2,0%	6,0%	8,0%
Wiraswasta	Count	5	4	9
	% of Total	5,0%	4,0%	9,0%
Total	Count	46	54	100
	% of Total	46,0%	54,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 20 atau 20,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 24 atau 24,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 11 atau 11,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 9 atau 9,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%.

Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

		Berwibawa dan Tegas		Total	
		Setuju	Tidak Setuju		
Pekerjaan	Buruh	Count	3	4	7
		% of Total	3,0%	4,0%	7,0%

Pengajar (Guru/Dosen)	Count	0	1	1
	% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
Ibu rumah tangga	Count	2	2	4
	% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
Pelajar/Mahasiswa	Count	31	13	44
	% of Total	31,0%	13,0%	44,0%
Pedagang kecil	Count	2	2	4
	% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
Karyawan swasta	Count	9	11	20
	% of Total	9,0%	11,0%	20,0%
Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	1	2	3
	% of Total	1,0%	2,0%	3,0%
Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	4	4	8
	% of Total	4,0%	4,0%	8,0%
Wiraswasta	Count	4	5	9
	% of Total	4,0%	5,0%	9,0%
Total	Count	56	44	100
	% of Total	56,0%	44,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas di ketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 31 atau 31,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 13 atau 13,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 9 atau 9,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 11 atau 11,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau

4,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 5 atau 5,0%.

Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

			Kreatif Inovatif		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pekerjaan	Buruh	Count	1	6	7
		% of Total	1,0%	6,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	8	36	44
		% of Total	8,0%	36,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Karyawan swasta	Count	2	18	20
		% of Total	2,0%	18,0%	20,0%
	Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	0	3	3
		% of Total	0,0%	3,0%	3,0%
	Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	1	7	8
		% of Total	1,0%	7,0%	8,0%
	Wiraswasta	Count	0	9	9
		% of Total	0,0%	9,0%	9,0%
Total		Count	12	88	100
		% of Total	12,0%	88,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas di ketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 8 atau 8,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 36 atau 36,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%.

Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 18 atau 18,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 9 atau 9,0%.

▲
Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

			Jujur Berintegritas		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pekerjaan	Buruh	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	7,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	5	39	44
		% of Total	5,0%	39,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	0	4	4
		% of Total	0,0%	4,0%	4,0%
	Karyawan swasta	Count	2	18	20
		% of Total	2,0%	18,0%	20,0%
	Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	0	3	3
		% of Total	0,0%	3,0%	3,0%
	Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	1	7	8
		% of Total	1,0%	7,0%	8,0%
	Wiraswasta	Count	3	6	9
		% of Total	3,0%	6,0%	9,0%
Total		Count	11	89	100
		% of Total	11,0%	89,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas di ketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak

7 atau 7,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 39 atau 39,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 18 atau 18,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%.

Pekerjaan * Persepsi Crosstabulation

			Peduli Masyarakat		Total
			Setuju	Tidak Setuju	
Pekerjaan	Buruh	Count	3	4	7
		% of Total	3,0%	4,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	1	0	1
		% of Total	1,0%	0,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	2	2	4
		% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	32	12	44
		% of Total	32,0%	12,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	2	2	4
		% of Total	2,0%	2,0%	4,0%
	Karyawan swasta	Count	13	7	20
		% of Total	13,0%	7,0%	20,0%
	Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	2	1	3
		% of Total	2,0%	1,0%	3,0%
	Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	6	2	8
		% of Total	6,0%	2,0%	8,0%

Wiraswasta	Count	7	2	9
	% of Total	7,0%	2,0%	9,0%
Total	Count	68	32	100
	% of Total	11,0%	89,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui Pekerjaan buruh Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa Persepsi Setuju sebanyak 5 atau 5,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 39 atau 39,0%. Pedagang kecil Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 4 atau 4,0%. Karyawan swasta Persepsi Setuju sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 18 atau 18,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) Persepsi Setuju sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur Persepsi Setuju sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 7 atau 7,0%. Wiraswasta Persepsi Setuju sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada persepsi tidak setuju sebanyak 6 atau 6,0%.

Berdasarkan hasil dari table uji crosstabs pada kategori jenis pekerjaan di atas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Surabaya yang memiliki persepsi negatif berada pada kategori Pelajar/Mahasiswa, yaitu sebesar 26% dengan rincian:

Jenis Pekerjaan	Jawaban “Setuju”	Jawaban “Tidak Setuju”
Buruh	10%	5%
Pengajar (Guru/Dosen)	-	1%
Ibu Rumah Tangga	1%	3%
Pelajar/Mahasiswa	16%	26%
Pedagang Kecil	1%	3%
Karyawan Swasta	6%	10%

Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	1%	2%
Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	2%	5%
Wiraswasta	3%	5%

B. Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Perilaku pemilih menurut Firmanzah adalah keseluruhan dari pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk dipengaruhi agar menjadi yakin dan memberikan dukungan kepada kontestan tersebut. Dalam menentukan pilihannya, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusannya. Firmanzah membagi empat tipe dalam menentukan perilaku pemilih, diantaranya:

1. Pemilih Rasional
2. Pemilih Kritis
3. Pemilih Tradisional
4. Pemilih Skeptis⁷⁶

Dalam penelitian ini, objek dari perilaku pemilih adalah masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020.

Tabel 5. 6 Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya

Jenis Pemilih	Faktor yang Mempengaruhi	Jawaban	
		Setuju	Tidak
Rasional	Visi Misi & Program Kerja Kandidat	56	44
	Kinerja & Pengalaman Kandidat	62	38
	Kualitas / Kompetensi	51	49
Kritis	Partai Politik Pengusung Kandidat	8	92

⁷⁶ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

Tradisional	Mengikuti Pilihan Mayoritas Tempat Tinggal / Keluarga / Warga Sekitar	29	71
	Mengikuti Pilihan Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah/Kyai/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	5	95
	Figure Pribadi Kandidat	41	59
	Latar Belakang Kandidat	11	89
	Agama yang Dianut Kandidat	26	74
	Asal Daerah dan Suku Bangsa Kandidat	1	99
	Gender/Jenis Kelamin Kandidat	1	99
	Karakter Personal Kandidat	55	45
	Penampilan Fisik Kandidat	9	91
Skeptis	Imbalan Uang/Barang	8	92
	Asal Memilih	2	98

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya masyarakat kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai masyarakat dengan perilaku memilih rasional, dengan rincian 56% pemilih rasional, 8% pemilih kritis, 18% pemilih tradisional, dan 5% pemilih skeptis.

Analisis Crosstab

Tabel 5. 7 Perilaku Memilih Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin * Perilaku_memilih Crosstabulation

			Perilaku_memilih			Total
			Rasional	Tradisional	Skeptis	
Jenis_Kelamin	Laki-laki	Count	30	15	1	46
		% of Total	30,0%	15,0%	1,0%	46,0%
	Perempuan	Count	32	19	3	54
		% of Total	32,0%	19,0%	3,0%	54,0%
Total	Count	62	34	4	100	
	% of Total	62,0%	34,0%	4,0%	100,0%	

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui Jenis kelamin laki-laki pada perilaku memilih rasional sebanyak 30 atau 30,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 15 atau 15,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, Jenis kelamin perempuan pada perilaku memilih rasional sebanyak 32 atau 32,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 19 atau 19,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 3 atau 3,0%.

Tabel 5. 8 Perilaku Memilih Berdasarkan Usia

Usia * Perilaku_memilih Crosstabulation

			Perilaku_memilih			Total
			Rasional	Tradisional	Skeptis	
Usia	17-22 tahun	Count	40	15	2	57
		% of Total	40,0%	15,0%	2,0%	57,0%
	23-30 tahun	Count	12	8	1	21
		% of Total	12,0%	8,0%	1,0%	21,0%
	31-40 tahun	Count	3	2	1	6
		% of Total	3,0%	2,0%	1,0%	6,0%
	41-52 tahun	Count	5	7	0	12
		% of Total	5,0%	7,0%	0,0%	12,0%
	53-71 tahun	Count	2	2	0	4
		% of Total	2,0%	2,0%	0,0%	4,0%
Total		Count	62	34	4	100
		% of Total	62,0%	34,0%	4,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui usia 17-22 tahun pada perilaku memilih rasional sebanyak 40 atau 40,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 15 atau 15,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 2 atau 2,0%. Kemudian, 23-30 tahun pada perilaku memilih rasional sebanyak 12 atau 12,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 8 atau 8,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%. Usia 31-40 tahun pada perilaku memilih rasional sebanyak 3 atau

3,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%. Usia 41-52 tahun pada perilaku memilih rasional sebanyak 4 atau 4,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 7 atau 7,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Usia 53-71 tahun pada perilaku memilih rasional sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%.

Tabel 5. 9 Perilaku Memilih Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan_Terakhir * Perilaku_memilih Crosstabulation

			Perilaku_memilih			Total
			Rasional	Tradisional	Skeptis	
Pendidikan_Terakhir	Tidak Sekolah/Tidak Tamat	Count	1	2	0	3
	SD	% of Total	1,0%	2,0%	0,0%	3,0%
SMP		Count	0	6	0	6
		% of Total	0,0%	6,0%	0,0%	6,0%
SMA/SMK		Count	47	21	3	71
		% of Total	47,0%	21,0%	3,0%	71,0%
Akademi/Diploma		Count	3	3	0	6
		% of Total	3,0%	3,0%	0,0%	6,0%
S1/Lebih Tinggi		Count	11	2	1	14
		% of Total	11,0%	2,0%	1,0%	14,0%
Total		Count	62	34	4	100
		% of Total	62,0%	34,0%	4,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas diketahui pendidikan tidak tamat SD pada perilaku memilih rasional sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Kemudian, SMP pada perilaku memilih rasional sebanyak 0 atau 0,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 6 atau 6,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Pendidikan SMA/SMK pada perilaku memilih rasional sebanyak 47 atau 47,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 21 atau

21,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 3 atau 3,0%. Pendidikan Akademi/Diploma pada perilaku memilih rasional sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 3 atau 3,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Pendidikan S1/Lebih Tinggi pada perilaku memilih rasional sebanyak 11 atau 11,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%.

Tabel 5. 10 Perilaku Memilih Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan * Perilaku_memilih Crosstabulation

			Perilaku_memilih			Total
			Rasional	Tradisional	Skeptis	
Pekerjaan	Buruh	Count	1	5	1	7
		% of Total	1,0%	5,0%	1,0%	7,0%
	Pengajar (Guru/Dosen)	Count	1	0	0	1
		% of Total	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%
	Ibu rumah tangga	Count	2	2	0	4
		% of Total	2,0%	2,0%	0,0%	4,0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	32	10	2	44
		% of Total	32,0%	10,0%	2,0%	44,0%
	Pedagang kecil	Count	3	1	0	4
		% of Total	3,0%	1,0%	0,0%	4,0%
	Karyawan swasta	Count	14	6	0	20
		% of Total	14,0%	6,0%	0,0%	20,0%
	Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll)	Count	1	2	0	3
		% of Total	1,0%	2,0%	0,0%	3,0%
	Sedang Mencari Pekerjaan/Menganggur	Count	1	7	1	9
		% of Total	1,0%	7,0%	1,0%	9,0%
	Wiraswasta	Count	7	1	0	8
		% of Total	7,0%	1,0%	0,0%	8,0%
Total		Count	62	34	4	100
		% of Total	62,0%	34,0%	4,0%	100,0%

Berdasarkan tabel uji Crosstab di atas di ketahui Pekerjaan buruh pada perilaku memilih rasional sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada perilaku

memilih tradisional sebanyak 5 atau 5,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%. Kemudian, pengajar (Guru, Dosen) pada perilaku memilih rasional sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 0 atau 0,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Pekerjaan Ibu rumah tangga pada perilaku memilih rasional sebanyak 2 atau 2,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Pekerjaan pelajar/mahasiswa pada perilaku memilih rasional sebanyak 32 atau 32,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 10 atau 10,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 2 atau 2,0%. Pedagang kecil pada perilaku memilih rasional sebanyak 3 atau 3,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 1 atau 1,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Karyawan swasta pada perilaku memilih rasional sebanyak 14 atau 14,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 6 atau 6,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Profesional (Pengacara, Dokter, Konsultan, dll) pada perilaku memilih rasional sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 2 atau 2,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%. Sedang mencari pekerjaan/Menganggur pada perilaku memilih rasional sebanyak 1 atau 1,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 7 atau 7,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 1 atau 1,0%. Wiraswasta pada perilaku memilih rasional sebanyak 7 atau 7,0%. Sedangkan pada perilaku memilih tradisional sebanyak 1 atau 1,0%. Perilaku memilih Skeptis sebanyak 0 atau 0,0%.

C. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang Polri Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Pengaruh persepsi masyarakat tentang calon pemimpin politik berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dianalisis menggunakan teknik analisis statistic inferensial. Teknik analisis statistic inferensial adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data

sampel dan hasilnya disimpulkan untuk populasi.⁷⁷ data dianalisis menggunakan SPSS for Windows 8. Selain menggunakan teknik analisis statistic inferensial, juga menggunakan uji T (uji hipotesis).

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah metode analisis yang mencari hubungan antara dua variable, dimana salah satu variable dianggap mempengaruhi variable lain.⁷⁸ Metode ini mencari pola hubungan antara variable X (Persepsi masyarakat Kota Surabaya tentang calon pemimpin berlatarbelakang Polri) dengan variable Y (Perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020).

Adapun rumus persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y: variabel terikat

a: nilai konstanta

b: koefisien regresi, yaitu nilai tingkatan atau turunan variable Y berdasarkan variable X

X: variable bebas

• Besaran Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

Tabel 5. 11 Besaran Pengaruh Antar Variabel

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.147	.139	1.81555

a. Predictors: (Constant), Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

⁷⁷ Yeri Sutopo & Achmad Slamet, *Statistika Inferensial*, (Jakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm 2.

⁷⁸ Basilisu Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm 135.

Berdasarkan 5.10 di atas menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi (R) dari model tersebut adalah sebesar 0,384. Dengan demikian tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y termasuk dalam kategori rendah. Hal ini berdasarkan lima kriteria tingkat korelasi menurut Joseph Hair, yaitu:⁷⁹

Tabel 5. 12 Kriteria Tingkat Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi
0.81 – 1.00	Sangat Tinggi
0.61 – 1.80	Tinggi
0.41 – 0.60	Sedang
0.21 – 0.40	Rendah
0.00 – 0.20	Tidak ada Korelasi

Selain itu berdasarkan tabel 5.4, nilai R^2 (Koefisien Determinasi) adalah sebesar 0.147. Sehingga pengaruh persepsi masyarakat tentang calon pemimpin politik berlatarbelakang polri (X) terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada pilkada Kota Surabaya tahun 2020 (Y) adalah sebesar 14.7% sedangkan 85.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Signifikansi Variabel X terhadap Variabel Y (Uji T)

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada persepsi masyarakat tentang calon pemimpin berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan pada persepsi masyarakat tentang calon pemimpin berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

Uji hipotesis dengan membandingkan nilai Sig dengan 0.05

Dasar pengambilan keputusan:

⁷⁹ Joseph F. Hair JR, *Multivariate Date Analisis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), edisi 5 hlm 87

- Apabila nilai $\text{sig} < 0.05$, maka terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y.
- Apabila nilai $\text{sig} > 0.05$, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 5. 13 Uji T (Sig 0.05)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1.800	.690		2.608	.011
	Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020	.406	.099	.384	4.115	.000

a. Dependent Variable: Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Calon Pemimpin Politik Berlatarbelakang POLRI

Berdasarkan output tabel 5.13 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 (konstan), yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang memiliki makna “terdapat pengaruh yang signifikan pada persepsi masyarakat tentang calon pemimpin berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam pemilihan walikota Surabaya Tahun 2020.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, diketahui bahwa persepsi masyarakat kota Surabaya terhadap calon kepala daerah berlatar belakang Polri (Machfud Arifin) adalah persepsi negatif, hal ini dibuktikan dengan rata-rata hasil kuesioner menunjukkan 67% responden tidak setuju terhadap kriteria-kriteria yang terdapat pada poin-poin pertanyaan kuesioner.

Masyarakat Kota Surabaya termasuk kedalam tipe pemilih rasional, karena dalam menentukan pilihannya masyarakat lebih mengutamakan visi-misi program kerja kandidat, kinerja & pengalaman kandidat, dan kualitas/kompetensi kandidat. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner bahwa masyarakat kota Surabaya diklasifikasikan menjadi 56% pemilih rasional, 8% pemilih kritis, 18% pemilih tradisional, dan 5% pemilih skeptis.

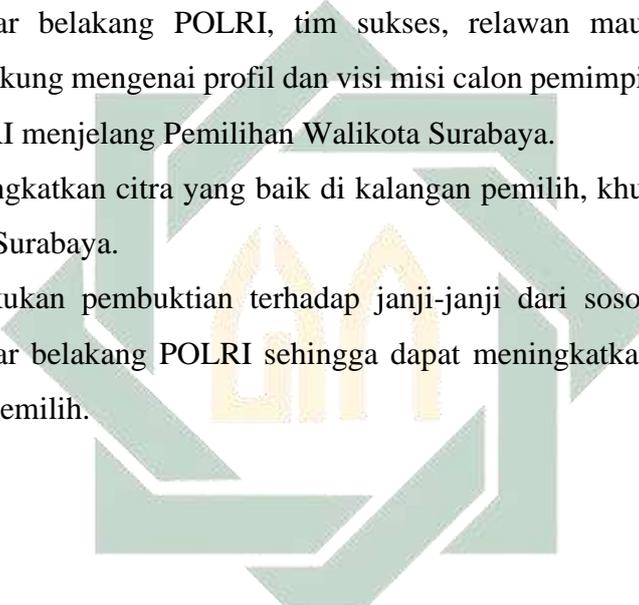
Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang calon pemimpin politik berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Dimana nilai signifikansi (Sig) sebesar 0.000 (konstan), yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang memiliki makna “terdapat pengaruh yang signifikan pada persepsi masyarakat tentang calon pimpinan berlatarbelakang Polri terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2020”. Selain itu berdasarkan nilai R^2 (Koefisien Determinasi) pengaruh persepsi masyarakat tentang calon pemimpin politik berlatarbelakang polri (X) terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Surabaya pada pilkada Kota Surabaya tahun 2020 (Y) adalah sebesar 14.7% sedangkan 85.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

Seorang pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam kepemimpinannya sebagai upaya mempengaruhi para pengikutnya.

Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi saat itu, sehingga seorang pemimpin dapat menarik perhatian para pengikutnya. Namun, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa calon pemimpin berlatar belakang POLRI Machfud Arifin kurang mendapat perhatian yang bagus dari kalangan pemilih. Sehingga, diharapkan bagi para calon pemimpin berlatar belakang POLRI kedepannya untuk memperhatikan:

1. Meningkatkan upaya sosialisasi yang lebih merata baik dari calon pemimpin berlatar belakang POLRI, tim sukses, relawan maupun partai politik pendukung mengenai profil dan visi misi calon pemimpin berlatar belakang POLRI menjelang Pemilihan Walikota Surabaya.
2. Meningkatkan citra yang baik di kalangan pemilih, khususnya masyarakat Kota Surabaya.
3. Melakukan pembuktian terhadap janji-janji dari sosok calon pemimpin berlatar belakang POLRI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemilih.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alfian Alfian M. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Arikunto Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Multidisipliner*. Banyumas: IKAPI.
- Department Tenaga Kerja. (1992). *Sejarah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
- Duli Nikolaus. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fattah Abdoel. (2005). *Demilitersasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: PT LKIS Yogyakarta.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendriyani & Suryani. (2018). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Indrayani & Damsar. (2016). *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- JRF Hair Joseph. (2006). *Multivariate Analisis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Eka Aprilia Swastika, dll Kayan. (2018). *Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998*. Jember: Universitas Jember.
- Martono Nanang. (2010). *Statistika Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Jakarta: Gava Media.
- Nge& Herri Julius Asmandi. (2019). *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Kasus Kabupaten Samba)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Purnomo Aldy Rochmat. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.

Qadaruddin Muhammad. (2016). Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi. Sleman: Deepublish.

Slamet Sutopo & Achmad Yeri. (2017). Statistika Inferensial. Jakarta: ANDI.

Sugiyono. (2018). Analisis Regresi Untuk Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryadinata Leo. (1995). Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Sutrisman Dudih. (2019). Pendidikan Politik, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Bogor: Guepedia.

Werang Redan Basilius. (2015). Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial. Yogyakarta: Calpulis.

Yusuf Muri. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

KARYA ILMIAH:

Bahri Pasinringi & Syamsul Andi. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Platform Partai Politik pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Efektivitas Kombinasi Politik pada Aspek Kognitif, Afektif dan Konatif di Kecamatan Mambo Barat. Jurnal Politik Vol 6 No 2.

Istyaningrum Dwi Febrinita. (2004). Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik: Pada Masa Orde Baru. Semarang: UNNES.

Larasati Salsabila. (2019). Militer dan Politik (Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi 2004-2014. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Sasongko Panji Joko. (2014). Politik Militer (Studi Kasus Persepsi Sipil Terhadap Partisipasi Politik Purnawirawan di Indonesia Pasca Reformasi). Yogyakarta: UGM.
- Shandi Frestilya AriIvanna. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Lampung: IAIN Metro.
- Wasti Muthiara Ryan. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia. Jurnal Politik Tahun 45 No.1, 87.
- Wendri. (2018). Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Medan Tentang Calon Gubernur Berlatarbelakang TNI Pada Pilkada 2018. Jurnal Komunikasi Vol1 No.2, 60-61.
- Yanuar Deni. (2017). Militer pada Pemilu Legislatif Antara Netralitas dan Profesionalitas. Jurnal Politik Vol 3 No 2.
- Yuriawati Aneu Ning. (2014). Optimalisasi Peran Strategis Pelayanan di Wilayah Kecamatan dalam Mendukung Pemerintah Yang BAIK. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

UNDANG-UNDANG:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada portal.divkum.polri.go.id

WEBSITE RESMI:

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya: <https://surabayakota.bps.go.id>

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur: jatim.bpk.go.id

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu: dpm-ptsp.surabaya.go.id

KPU Kota Surabaya: <https://kpu-surabayakota.go.id>

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: referensi.data.kemdikbud.go.id

Pemerintah Kota Surabaya: www.surabaya.go.id